

SKRIPSI

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBIAYAAN PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Riau Pekanbaru*



DISUSUN OLEH

UMI LATIFAH
NPM. 145210426

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2019

ABSTRACT**ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING ISLAMIC BANKING FINANCING IN INDONESIA**

By :

UMI LATIFAH
NPM. 145210426

The purpose of this study is to determine the factors that influence Mudharabah Financing and Musyarakah Financing in Islamic Banking in Indonesia. Financing at an Islamic bank is a funding activity issued to support investments made by the bank to customers. Islamic commercial banks used as samples in this study are seven Islamic commercial banks. The data used for this study are secondary data with a research period of 2014-2018. The results showed that the Non Performing Financing (NPF), Capital Adequacy Ratio (CAR), Return On Assets (ROA), Financing Deposit Ratio (FDR) and Operational Expenses Operating Income (BOPO) results simultaneously affected the mudharabah financing and musharaka financing. For partial results, the Non Performing Financing (NPF) variable, Operational Income Operating Expenses (BOPO) and Return On Assets (ROA) have no significant effect on mudharabah financing and musyarakah financing, Capital Adequacy Ratio (CAR) and Financing Deposit Ratio (FDR) significant effect on mudharabah financing and musyarakah financing.

Keywords: Mudharabah Financing, Musyarakah Financing, Non Performing Financing (NPF), Capital Adequacy Ratio (CAR), Return On Assets (ROA), Financing Deposit Ratio (FDR) and Operational Expenses Operating Income (BOPO).

ABSTRAK**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBIAYAAN
PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA**

Oleh :

UMI LATIFAH
NPM. 145210426

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah pada Perbankan Syariah di Indonesia. Pembiayaan pada bank syariah merupakan aktivitas pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang dilakukan oleh bank tersebut kepada nasabah. Bank umum syariah yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini adalah tujuh bank umum syariah. Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data sekunder dengan periode penelitian tahun 2014-2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Non Performing Financing* (NPF), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return On Aset* (ROA), *Financing Deposit Ratio* (FDR) dan Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) hasil secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah. Untuk hasil secara parsial, variabel *Non Performing Financing* (NPF), Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) dan *Return On Aset* (ROA) tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah, *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Financing Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah.

Kata kunci : Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, *Non Performing Financing* (NPF), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return On Aset* (ROA), *Financing Deposit Ratio* (FDR) dan Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO).

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim.

Assalamu'alakum, wr, wb.

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul ***ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBIAYAAN PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA.***

Penulis skripsi ini selain dimaksud sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana (Strata-1), Fakultas Ekonomi pada Universitas Islam Riau Jurusan Manajemen, juga dimaksudkan untuk mengetahui sampai sejauh mana kemampuan penulis menganalisa dan mengekspresikan pengetahuan yang diperoleh selama kuliah.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, karena keterbatasan-keterbatasan yang ada pada penulis. Walaupun demikian penulis berusaha semaksimal mungkin agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapat bimbingan, pengarahan serta motivasi dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof.Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau
2. Bapak Drs. H. Abrar, M.Si., Ak. CA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau
3. Bapak Firdaus, AR, SE., M.Si. Ak. CA, selaku Wakil Dekan 1 dan Ibu Eva Sundari, SE., MM selaku Wakil Dekan II.

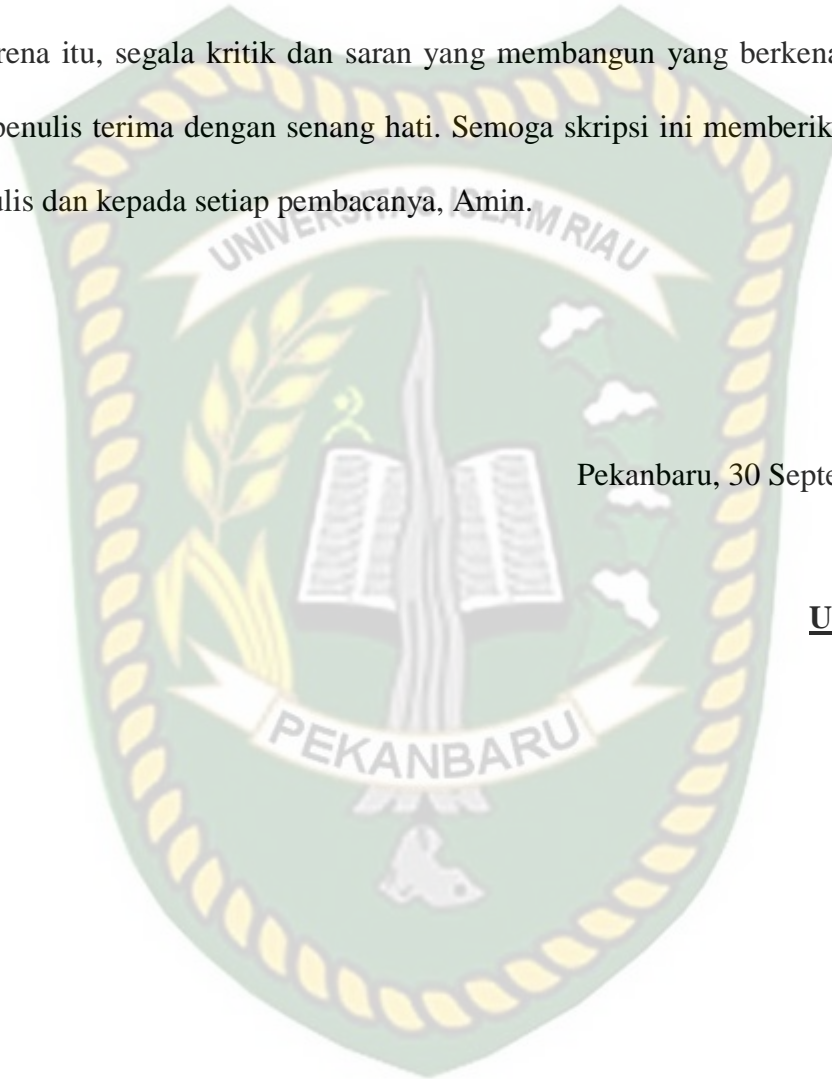
4. Bapak Azmansyah, SE.,M.Econ selaku Ketua Program Studi Manajemen.
5. DR. Eka Nuraini R. M.Si selaku pembimbing penulis yang telah memberikan bimbingan yang terbaik kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Hj. Susie Suryani, SE., MM selaku pembimbing penulis yang telah memberikan bimbingan yang terbaik kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh dosen pengajar dilingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu dibidangnya kepada penulis.
8. Staf Tata Usaha Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang selama ini memberikan kemudahan administrasi selama masa perkuliahan.
9. Kedua orangtua penulis, yang tidak henti-hentinya memberikan do'a, dukungan, nasihat dan motivasi kepada penulis. Terimakasih sudah menjadi orang tua terbaik.
10. Kepada Adik saya yang tidak henti-hentinya memberikan semangat dan keluarga besar saya juga yang sudah selalu memberikan dukungan, motivasi dan do'anya. Terimakasih untuk dukungan, motivasi dan do'anya.
11. Kepada Sahabat-sahabat saya sekaligus keluarga kedua yang selalu ada disetiap keadaan apapun, selalu mendukung dalam menjalankan skripsi ini dan terimakasih sudah menjadi keluarga kedua untuk penulis.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungannya. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT, Amin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik materi maupun sistematikanya. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya waktu, pengetahuan, pengalaman serta kemampuan yang penulis miliki.

Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun yang berkenaan dengan skripsi ini, penulis terima dengan senang hati. Semoga skripsi ini memberikan manfaat kepada penulis dan kepada setiap pembacanya, Amin.

Pekanbaru, 30 September 2019

Umi Latifah
145210426



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
1.4. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TELAAH PUSTAKA	
2.1. Bank Syariah	11
2.1.1. Pengertian Bank Syariah	11
2.1.2. Fungsi Bank Syariah	11
2.1.3. Tujuan Bank Syariah	12
2.1.4. Produk Perbankan Syariah	13
2.2. Modal Bank	16
2.2.1. Komponen - komponen Modal Bank	17
2.2.2. Fungsi Modal Bank	21
2.3. Pengertian dan Jenis Pembiayaan pada Bank Syariah	24
2.3.1. Pengertian Pembiayaan	24
2.3.2. Macam-Macam Kegiatan Pembiayaan pada Bank Syariah	26
2.3.3. Kegiatan Pemberian Kredit atau Pembiayaan Pada Bank Syariah	26
2.3.4. Resiko Perkreditan Akibat Pembiayaan bermasalah	28
2.3.5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan	30
2.4. Penelitian Terdahulu	32

2.5. Kerangka Pemikiran.....	35
2.6. Hipotesis.....	36

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian.....	38
3.2. Operasional Variabel.....	38
3.3. Populasi dan Sampel.....	39
3.4. Jenis dan Sumber Data.....	41
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	42
3.6. Teknik Analisis Data.....	42

BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

4.1. Sejarah Bank Syariah di Indonesia.....	50
4.2. Gambaran Umum Bank Syariah.....	53
4.2.1. BRI Syariah.....	53
4.2.2. BNI Syariah.....	55
4.2.3. Bank Syariah Mandiri.....	56
4.2.4. BCA Syariah.....	58
4.2.5. Panin Bank Syariah.....	60
4.2.6. Bank Victoria Syariah.....	62
4.2.7. Bank Bukopin Syariah.....	63

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian.....	66
5.1.1. Pembiayaan Mudharabah.....	66
5.1.2. Pembiayaan Musyarakah.....	67
5.1.3. <i>Non Performing Finance</i> (NPF).....	68
5.1.4. <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR).....	69
5.1.5. <i>Return On asset</i> (ROA).....	70
5.1.6. <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR).....	71
5.1.7. Biaya Operasional dibagi Pendapatan	

Operasional (BOPO)	73
5.2. Hasil Analisis Statistik	74
5.3. Analisis Data	75
5.3.1. Uji Normalitas Data.....	75
5.3.2. Uji Asumsi Klasik	76
5.4. Pengaruh NPF, CAR, ROA, FDR dan BOPO Terhadap Pembiayaan Mudharabah (Y1).....	83
5.5. Pengaruh NPF, CAR, ROA, FDR dan BOPO Terhadap Pembiayaan Musyarakah (Y2)	85
5.6. Koefisien Determinasi.....	85
5.7. Pengujian Hipotesis.....	87
5.8. Pembahasan.....	92
5.8.1. Pengaruh NPF Terhadap Pembiayaan Mudharabah.....	92
5.8.2. Pengaruh CAR Terhadap Pembiayaan Mudharabah.....	93
5.8.3. Pengaruh ROA terhadap Pembiayaan Mudharabah.....	94
5.8.4. Pengaruh FDR terhadap Pembiayaan Mudharabah.....	95
5.8.5. Pengaruh BOPO Terhadap Pembiayaan Mudharabah	96
5.8.6. Pengaruh NPF Terhadap Pembiayaan Musyarakah	97
5.8.7. Pengaruh CAR Terhadap Pembiayaan Musyarakah	97
5.8.8. Pengaruh ROA terhadap Pembiayaan Musyarakah	98
5.8.9. Pengaruh FDR terhadap Pembiayaan Musyarakah	99
5.8.10. Pengaruh BOPO Terhadap Pembiayaan Musyarakah.....	99

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan.....	102
5.2. Saran.....	103

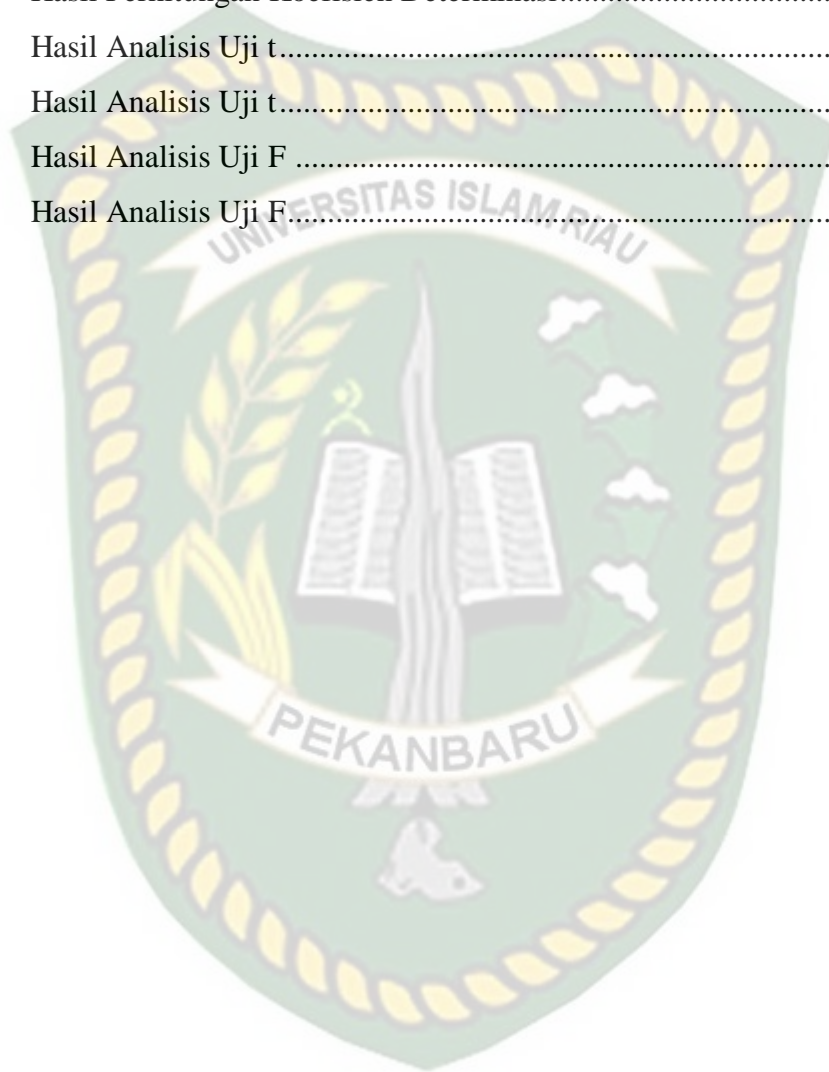
Daftar Pustaka

Lampiran

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tinjauan Penelitian Terdahulu	33
Tabel 3.1	Operasional Variabel.....	38
Tabel 3.2	Daftar Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan	40
Tabel 3.3	Daftar Sampel Penelitian	41
Tabel 5.1	Pembiayaan Mudharabah Bank Umum Syariah Tahun 2014-2018 (jutaan rupiah).....	67
Tabel 5.2	Pembiayaan Musyarakah Bank Umum Syariah Tahun 2014-2018 (jutaan rupiah).....	68
Tabel 5.3	<i>Non performing Financing</i> (NPF) Bank Umum Syariah Tahun 2014-2018 (jutaan rupiah)	69
Tabel 5.4	Capital Adequacy Ratio (CAR) Bank Umum Syariah Tahun 2014-2018 (jutaan rupiah).....	70
Tabel 5.5	<i>Return On Asset</i> (ROA) Bank Umum Syariah Tahun 2014-2018 (jutaan rupiah).....	71
Tabel 5.6	<i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR) Bank Umum Syariah Tahun 2014-2018 (jutaan rupiah).....	72
Tabel 5.7	BOPO Bank Umum Syariah Tahun 2014-2018 (jutaan rupiah).....	73
Tabel 5.8	Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	74
Tabel 5.9	Hasil Uji Normalitas	76
Tabel 5.10	Hasil Perhitungan Autokorelasi	77
Tabel 5.11	Runs Test	78
Tabel 5.12	Hasil Perhitungan Autokorelasi	78
Tabel 5.13	Runs Test	79
Tabel 5.14	Hasil Perhitungan Multikolinieritas	80
Tabel 5.15	Hasil Perhitungan Multikolinieritas	80
Tabel 5.16	Pengaruh NPF, CAR, ROA, FDR dan BOPO Terhadap Mudharabah (Y1).....	83

Tabel 5.17	Pengaruh NPF, CAR, ROA, FDR dan BOPO Terhadap Pembiayaan Masyarakat (Y2).....	84
Tabel 5.18	Hasil Perhitungan Koefisien Determinasi.....	86
Tabel 5.19	Hasil Perhitungan Koefisien Determinasi.....	86
Tabel. 5.20	Hasil Analisis Uji t.....	88
Tabel 5.21	Hasil Analisis Uji t.....	89
Tabel 5.22	Hasil Analisis Uji F.....	91
Tabel 5.23	Hasil Analisis Uji F.....	91



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Daftar Gambar

Gambar 1.1	Penyaluran Pembiayaan Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2014-2018 (miliar rupiah).....	5
Gambar 2.1	Kerangka Penelitian Pembiayaan Mudharabah (Y1).....	35
Gambar 2.1	Kerangka Penelitian Pembiayaan Musyarakah (Y2)	36
Gambar 5.1	Hasil Uji Heterokedastisitas Terhadap Pembiayaan Mudharabah (Y1).....	81
Gambar 5.2	Hasil Uji Heterokedastisitas Terhadap Pembiayaan Musyarakah (Y2)	82



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kegiatan ekonomi merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia. Islam mengatur hal-hal yang bersifat duniawi maupun akhirat dan tak terkecuali mengenai kegiatan ekonomi. Ekonomi dalam konsep Islam atau ekonomi syariah dalam UU No.7 tahun 1989 merupakan kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah. Atau dengan kata lain ekonomi syariah memiliki karakteristik dan nilai-nilai yang berfokus kepada *amar ma'ruf nahi mungkar* yang berarti mengerjakan yang benar dan meninggalkan yang dilarang. Selain itu ekonomi syariah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dalam kerangka norma dan moral Islam, membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid berdasarkan keadilan dan persaudaraan yang universal, mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata, serta menciptakan kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial (Ali, 2008: 2-3).

Dewasa ini ekonomi syariah terkesan lebih identik dengan konsep tentang sistem keuangan dan perbankan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang salah satunya petunjuk Tuhan dalam Al-Qur'an dan Sunnah yang paling menonjol dan menjadi perhatian para ulama dan cendekiawan Muslim adalah, doktrin transaksi nonribawi (larangan praktik riba) (Karim, 2004: iv). Sehingga sekarang ini berkembanglah lembaga keuangan syariah yang menganut konsep untuk tidak melakukan praktik riba atau pengenaan bunga melainkan prinsip bagi hasil, hal ini

bertujuan untuk menggantikan sistem lembaga keuangan konvensional yang cenderung berbasis atau berdasarkan sistem bunga yang identik dengan riba.

Bank syariah dalam UU No 21 Tahun 2008 adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Perbankan syariah menjalankan fungsi bank pada umumnya, sebagaimana yang dijalankan oleh perbankan konvensional yakni melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat berupa kredit dan jasa-jasa lainnya. Hanya saja kegiatan tersebut berdasarkan pada prinsip syariah, dimana dalam UU 21 Tahun 2008 prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Produk yang ditawarkan oleh bank syariah beragam diantaranya produk pembiayaan. Dimana, pembiayaan merupakan salah satu produk perbankan syariah sebagai bagian dari sistem perbankan nasional yang memegang peranan strategis dalam mobilisasi sumber-sumber keuangan masyarakat untuk menggerakkan sektor riil dan pembiayaan pembangunan nasional (Wardi dan Gusmarila, 2011: 447).

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah.

Dari sisi rasio keuangan, kesehatan bank dapat diukur dari rasio permodalan (*capital*), rasio assets (*assets quality*), manajemen (*management*), rasio laba (*earning*), dan rasio likuiditas (*liquidity*). Rasio permodalan yang lazim digunakan untuk mengukur kesehatan bank adalah *capital adequacy ratio* (CAR). Besarnya CAR diukur dari rasio antara modal sendiri terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Ratio (ATMR). Sesuai dengan SE BI No. 26/5/BPPP tanggal 29 Mei 1993. Besarnya CAR yang harus dicapai oleh suatu bank minimal 8% sejak akhir tahun 1995, dan sejak akhir tahun 1997 CAR yang harus dicapai minimal 9% tetapi karena kondisi perbankan sejak akhir 1997 terpuruk yang ditandai dengan banyaknya bank yang dilikuidasi, maka sejak oktober tahun 1998 dikelompokkan dalam : (1) Bank sehat dengan klasifikasi A jika memiliki CAR lebih dari 4%; (2) Bank take over atau dalamnya penyehatan oleh BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) dengan klasifikasi B jika bank tersebut memiliki CAR antara -25% sampai dengan < dari 4%; dan (3) Bank Beku Operasi (BBO) dengan klasifikasi C jika memiliki CAR kurang dari -25%. Bank dengan klasifikasi C inilah yang dilikuidasi (Faisal, 2003).

Kebijakan penyaluran dana untuk kegiatan pembiayaan dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal bank. Faktor internal bank antara lain

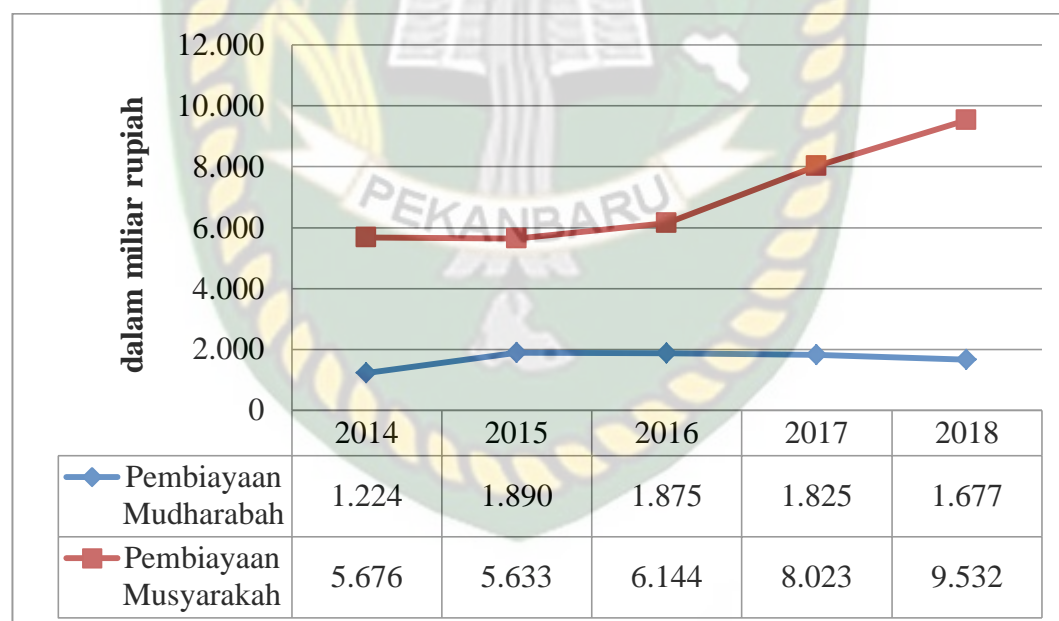
berkaitan dengan persepsi bank terhadap prospek usaha debitur, rasio keuangan perbankan seperti jumlah kredit macet (NPF), kecukupan modal (CAR), laba yang diperoleh, batas aman pemberian pembiayaan (FDR) dan promosi yang digunakan untuk mengumpulkan dana pihak ketiga (biaya promosi). Sedangkan faktor eksternal bank berkaitan dengan kondisi perekonomian seperti tingkat inflasi (Muna, 2013: 3). Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Arianti dan Muharam (2012) dalam penelitiannya Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan yaitu Simpanan (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return On Asset* (ROA), Dan *Non Performing Financing* (NPF), selain itu Siregar (2004) dalam penelitiannya tentang Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyaluran Dana Perbankan Syariah yaitu DPK, Bonus Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia (SWBI) Dan *Non Performing Financing* (NPF).

Peneliti bermaksud mengkaji hal yang serupa yakni pembiayaan akan tetapi dalam penelitian ini peneliti menggunakan variabel bebas yang terdiri dari faktor simpanan (DPK), *Return On Asset* (ROA), dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dengan objek penelitian pada perbankan syariah di Indonesia, selain itu dalam penelitian ini adanya variabel FDR alasan peneliti menggunakan variabel ini karena, menurut Dendawijaya (2009:116) rasio FDR atau LDR dapat melihat seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya.

Sehingga semakin besar penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan dibandingkan dengan deposit atau simpanan masyarakat dalam suatu bank

membawa konsekuensi semakin besar resiko yang ditanggung oleh bank yang bersangkutan. Apabila kredit yang disalurkan bermasalah, bank akan mengalami kesulitan untuk mengembalikan dana yang dititipkan oleh masyarakat (Umam, 2013: 256). Alasan peneliti ingin mengkaji penelitian tentang pembiayaan karena, pembiayaan merupakan salah satu produk perbankan syariah yang memegang peranan strategis dalam mobilisasi sumber-sumber keuangan sehingga dapat menggerakkan sektor rill. Berikut dapat dilihat jumlah pembiayaan bank-bank syariah di Indonesia selama tahun 2014-2018, yaitu :

Gambar 1.1
Penyaluran Pembiayaan Bank Umum Syariah di Indonesia
Tahun 2014-2018 (miliar rupiah)



Sumber : Statistik Pebankan Syariah, OJK (2019)

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa pembiayaan yang disalurkan oleh Bank umum Syariah dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Pembiayaan mudharabah paling besar dikeluarkan pada tahun 2015 sebesar Rp. 1.890 (dalam miliar rupiah) dan pembiayaan paling kecil pada tahun 2014 sebesar Rp. 1.224

(dalam miliar rupiah) sedangkan untuk pembiayaan musyarakah paling besar pada tahun 2018 sebesar Rp.9.532 (dalam miliar rupiah) dan terkecil pada tahun 2015 sebesar Rp. 5.633 (dalam miliar rupiah). Seluruh pembiayaan yang disalurkan sebagian besar berasal dari *murabahah* (pembiayaan jual beli) dibandingkan dengan pembiayaan yang berasal dari pembiayaan dengan pola bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*). Hal ini berbeda dengan persepsi umum yang menganggap bahwa bank syariah merupakan bank yang melakukan kegiatan bisnis berdasarkan bagi hasil. Disamping itu simpanan atau dana pihak ketiga (DPK) juga mengalami peningkatan.

Non performing Financing (NPF) mencerminkan risiko kemungkinan kerugian yang akan timbul atas penyaluran dana oleh bank. Tingginya NPF membuat bank perlu membentuk pencadangan atas kredit bermasalah yang lebih besar, hal ini akan menurunkan pendapatan bank. Menurunnya pendapatan bank akan berpengaruh terhadap menurunnya modal yang dimiliki oleh bank. karena besarnya modal yang dimiliki oleh bank akan berpengaruh kepada besarnya ekspansi dalam penyaluran dana (pembiayaan).

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan rasio permodalan yang menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha dan menampung risiko kerugian dana yang diakibatkan oleh kegiatan operasi bank. Bank Indonesia menetapkan CAR yang dimiliki oleh bank minimal 8%. Apabila ketentuan CAR tidak terpenuhi, maka akan mempengaruhi tingkat kesehatan bank dan akan mengurangi kemampuan ekspansi penyaluran dana.

Return On asset (ROA) adalah rasio yang mampu mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba pada masa lalu. Jika ROA suatu bank semakin besar, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik posisi bank tersebut dari segi pengamanan aset. Laba yang tinggi membuat bank mendapat kepercayaan dari masyarakat yang memungkinkan bank untuk menghimpun modal yang lebih banyak sehingga bank memperoleh kesempatan menyalurkan dana dengan lebih luas.

BOPO dijadikan variable independen yang mempengaruhi pembiayaan didasarkan atas logika teori dari Muljono (1995) yang menyatakan bahwa semakin kecil BOPO menunjukkan semakin efisien bank dalam menjalankan aktivitas usahanya, karena biaya operasi yang ditanggung lebih kecil dari pendapatan operasinya sehingga aktivitas operasional bank menghasilkan keuntungan, dimana hal tersebut mampu meningkatkan modal bank dan meminimumkan tingkat risikonya sehingga BOPO yang relative rendah mampu meningkatkan pembiayaan.

Dana pihak ketiga adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha, yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki bank. Dana pihak ketiga memiliki kontribusi terbesar dari beberapa sumber dana tersebut sehingga jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh suatu bank akan mempengaruhi kemampuannya dalam menyalurkan kredit. Kredit diberikan kepada debitur yang telah memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam perjanjian yang dilakukan antara pihak debitur dengan pihak bank. Dana yang dipercayakan oleh

masyarakat kepada bank dapat berupa giro, tabungan dan deposito. Dana-dana pihak ketiga yang dihimpun dari masyarakat merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank (mencapai 80%-90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank). Biasanya DPK akan sangat mempengaruhi pembiayaan yang dilakukan oleh bank.

Kondisi perekonomian nasional seperti inflasi akan secara langsung mempengaruhi iklim usaha perbankan dalam pembiayaan dan pengumpulan dana dari nasabah yang telah dibiayai. Hal ini pasti berpengaruh pada besaran pendapatan yang akan diperoleh oleh bank dan kemampuan nasabah dalam membayar pinjamannya. Oleh karena itu, bank akan lebih berhati-hati dalam menyalurkan dananya kepada sektor ini.

Dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang **“Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Pembiayaan Pada Perbankan Syariah di Indonesia”**

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat dirumuskan masalah yaitu faktor-faktor apakah yang mempengaruhi Pembiayaan Pada Perbankan Syariah di Indonesia?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Pembiayaan Pada Perbankan Syariah di Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Sebagai wadah bagi penulis dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan.
- b. Sebagai pertimbangan bagi perusahaan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi khususnya dalam hal faktor-faktor yang mempengaruhi Pembiayaan Pada Perbankan Syariah di Indonesia.
- c. Sebagai informasi bagi penelitian ilmiah selanjutnya.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini berisi penjelasan tentang isi yang terkandung dari masing-masing bab secara singkat dari keseluruhan skripsi ini. Sistematika dalam penulisan skripsi ini dijelaskan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TELAAH PUSTAKA

Dalam bab ini menguraikan landasan teori yang terdiri dari analisis rasio keuangan, jenis-jenis analisis rasio keuangan, alasan penggunaan analisis rasio keuangan, tujuan analisis rasio keuangan, keunggulan analisis rasio keuangan, pengertian dan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan, serta diuraikan juga penelitian terdahulu dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Berisi penjelasan mengenai variabel penelitian, penentuan sampel yang dipilih, jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian, metode

pengumpulan data serta penjelasan mengenai metode analisis data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai sejarah Perbankan syariah di Indonesia dan profil perusahaan sektor perbankan syariah yang dijadikan sampel pada penelitian ini.

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil dan pembahasan mengenai faktor-faktor apakah yang mempengaruhi Pembiayaan Pada Perbankan Syariah di Indonesia.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Merupakan bab terakhir yang mana berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari pembahasan. Saran yang diajukan berkaitan dengan penelitian dan merupakan anjuran yang diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam penelitian.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1. Bank Syariah

2.1.1. Pengertian Bank Syariah

Menurut UU No. 10 Tahun 1998 dalam buku Sofyan S. Harahap, dkk (2005 : 3), pengertian bank dan prinsip syariah sebagai berikut :

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan lainnya yang dinyatakan dengan syariah.

Menurut Heri Sudarsono (2003 : 27), "Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah."

2.1.2. Fungsi Bank Syariah

Fungsi bank syariah yaitu

1. Manajer investasi. Bank syariah merupakan manajer investasi dari pemilik dana dan dari dana yang dihimpunnya. Besar kecilnya pendapatan yang diterima oleh pemilik dana sangat tergantung pada pendapatan yang diterima oleh bank syariah dalam mengelola dana yang dihimpunnya serta pada keahlian, kehati-hatian dan profesionalismenya.

2. Investor. Dalam penyaluran dana, bank syariah berfungsi sebagai investor (pemilik dana).
3. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran. Dalam hal ini bank syariah dapat melakukan berbagai kegiatan jasa pelayanan perbankan sebagaimana lazimnya, seperti transfer uang.
4. Pelaksana kegiatan sosial. Sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, bank Islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola zakat serta dana-dana sosial lainnya.

2.1.3. Tujuan Bank Syariah

Bank syariah mempunyai beberapa tujuan diantaranya:

1. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk ber-muamalat secara Islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan. Agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur *gharar* (tipuan). Dimana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam juga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat.
2. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi. Gunanya agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
3. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan

kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.

4. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang. Upaya bank syariah di dalam mengentaskan kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol sifat kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap seperti program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara, program pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja dan program pengembangan usaha bersama.
5. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi diakibatkan adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan.
6. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam kepada bank non-syariah

2.1.4. Produk Perbankan Syariah

Bank sebagai lembaga perantara keuangan memiliki 2 kegiatan utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kembali kepada masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan modal dan pembiayaan, bank syariah memiliki ketentuan-ketentuan yang berbeda dengan bank konvensional. Secara umum alat-alat yang digunakan bank syariah terdiri atas tiga kategori yaitu:

1. Penghimpunan Dana (*Funding*)

Sumber dana bank syariah dapat diperoleh dari empat sumber yaitu modal, titipan, investasi dan investasi khusus. Penghimpunan dana akan dijelaskan secara terperinci pada sub bab berikutnya.

2. Penyaluran Dana (*Financing*)

Penyaluran dana bank syariah dilakukan dengan berbagai metode. Secara sederhana, metode penyaluran dana bank syariah dapat diilustrasikan.

a) Prinsip Jual Beli

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*). Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Transaksi jual beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayaran dan waktu penyerahan barangnya, yakni sebagai berikut:

1. Pembiayaan *Murabahah*

Menurut Jaih Mubarak (2004 : 306), "Mudharabah adalah akad jual beli antara bank dengan nasabah. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah dan menjual kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati."

2. Pembiayaan *Salam*

Menurut Jaih Mubarak (2004 : 310), Salam adalah akad jual beli pesanan antara pembeli dengan penjual. Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati di awal akad dan pembayarannya dilakukan dimuka secara penuh. Apabila bank bertindak sebagai pembeli kemudian memesan

barang kepada pihak lain untuk menyediakan barang maka hal ini disebut *salam paralel*.

3. Pembiayaan *Ishtishna*

Menurut Bank Indonesia dalam buku Jaih Mubarak (2004 : 280) disebutkan bahwa "prinsip *istishna* menyerupai *salam*, namun dalam *istishna* pembayarannya dapat dimuka, dicicil atau dibelakang. *Istishna* dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur, industri kecil menengah dan konstruksi."

b) Prinsip Sewa Beli

Dalam prinsip sewa beli ini dikenal yang namanya *Ijarah Wa Iqtina / Ijarah Muntahhiyah Bittamlik*. Menurut Bank Indonesia dalam buku Jaih Mubarak (2004 : 282), "*Ijarah Wa Iqtina / Ijarah Muntahhiyah Bittamlik* adalah akad sewa menyewa suatu barang antara bank dengan nasabah dimana nasabah diberi kesempatan untuk membeli obyek sewa pada akhir akad. Harga sewa dan harga beli ditetapkan bersama di awal perjanjian."

c) Prinsip Bagi Hasil

1. Pembiayaan *Musyarakah*

Menurut Jaih Mubarak (2004 : 306) disebutkan, "Musyarakah adalah akad kerjasama usaha patungan antara dua pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu jenis usaha yang halal dan produktif. Pendapatan atau keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati."

2. Pembiayaan *Mudharabah*

Menurut Jaih Mubarak (2004 : 304), "Mudharabah adalah akad antara pemilik dana dengan pengelola untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal akad."

3. Jasa Perbankan (*Banking Services*)

Bank syariah dapat melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapatkan imbalan atas jasa yang diberikannya. Produk jasa perbankan tersebut antara lain:

a) *Hiwalah* (Alih Utang-Piutang)

Dalam bukunya Muhammad (2005 : 188) menyebutkan, "Hiwalah adalah transaksi pengalihan utang piutang. Dalam praktik perbankan, fasilitas hiwalah lazimnya digunakan untuk membantu pemasok mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan piutang."

b) *Wakalah* (Perwakilan)

Muhammad (2005 : 189) menyebutkan bahwa dalam wakalah "nasabah memberi kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti transfer uang."

2.2. Modal Bank

Modal adalah dana yang ditempatkan pihak pemegang saham, pihak pertama pada bank yang memiliki peranan sangat penting sebagai penyerap jika timbul kerugian (*risk loss*). Modal juga merupakan investasi yang dilakukan oleh

pemegang saham yang harus selalu berada dalam bank dan tidak ada kewajiban pengembalian atas penggunaannya.

Pengertian modal menurut Dahlan Siamat (2000;56) :

“Modal bank adalah dana yang diinvestasikan oleh pemilik dalam rangka pendirian badan usaha yang dimaksudkan untuk membiayai kegiatan usaha bank disamping memenuhi peraturan yang ditetapkan”

Adapun pengertian modal menurut Komaruddin Sastradipoera (2004;297) :

“Modal bank sebagai sejumlah dana yang diinvestasikan dalam berbagai jenis usaha (*ventura*) perbankan yang relevan”

Sedangkan pengertian modal menurut N.Lapoliwa (2000;137) :

“Modal bank merupakan modal awal pada saat pendirian bank yang jumlahnya telah ditetapkan dalam suatu ketentuan atau pendirian bank”

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa modal bank merupakan dana yang diinvestasikan oleh pemilik untuk membiayai kegiatan usaha bank yang jumlahnya telah ditetapkan.

2.2.1. Komponen - komponen Modal Bank

1. Modal Inti (*primary capital*)

Komponen modal inti pada prinsipnya terdiri atas modal disetor dan cadangan-cadangan yang dibentuk dari laba setelah pajak. Dengan perincian sebagai berikut:

- a. Modal disetor, yaitu modal yang disetor secara efektif oleh pemiliknya.
- b. Agio saham, yaitu selisih lebih setoran modal yang diterima oleh bank sebagai akibat harga saham yang melebihi nilai nominalnya.

- c. Cadangan Umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan atau dari laba bersih setelah dikurangi pajak, dan mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota sesuai dengan ketentuan pendirian atau anggaran dasar masing-masing bank.
- d. Cadangan Tujuan, yaitu bagian laba setelah dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu dan telah mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota.
- e. Laba yang ditahan (*retained earnings*), yaitu saldo laba bersih setelah dikurangi pajak yang oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota diputuskan untuk tidak dibagikan.
- f. Laba tahun lalu, yaitu laba bersih tahun-tahun lalu setelah dikurangi pajak, dan belum ditetapkan penggunaannya oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota. Jumlah laba tahun lalu yang diperhitungkan sebagai modal inti hanya sebesar 50%. Dalam hal bank mempunyai saldo rugi tahun-tahun lalu, maka seluruh kerugian tersebut menjadi faktor pengurang dari modal inti.
- g. Laba tahun berjalan, yaitu laba yang diperoleh dalam tahun buku berjalan setelah dikurangi taksiran utang pajak. Jumlah laba tahun buku berjalan yang diperhitungkan sebagai modal inti hanya sebesar 50%. Dalam hal pada tahun berjalan bank mengalami kerugian, maka seluruh kerugian tersebut menjadi faktor pengurang dari modal inti.
- h. Bagian kekayaan bersih anak perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan (*minority interest*), yaitu modal inti anak perusahaan

setelah dikompensasikan dengan nilai penyertaan bank pada anak perusahaan tersebut. Yang dimaksud dengan anak perusahaan adalah bank lain, lembaga keuangan atau lembaga pembiayaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh bank.

2. Modal Pelengkap (*secondary capital*)

Modal pelengkap terdiri atas cadangan-cadangan yang dibentuk tidak dari laba setelah pajak serta pinjaman yang sifatnya dipersamakan dengan modal. Secara rinci modal pelengkap dapat berupa :

1. Cadangan revaluasi aktiva tetap, yaitu cadangna yang dibentuk dari selisih penilaian kembali aktiva tetap yang telah mendapat persetujuan Direktorat Jendral Pajak.
2. Cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan, yaitu cadangan yang dibentuk dengan cara membebani laba rugi tahun berjalan, denga maksud untuk menampung kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari tidak diterimanya kembali sebagian atau seluruh aktiva produktif. Dalam kategori, cadangan ini termasuk cadangan piutang ragu-ragu dan cadangan penurunan nilai surat-surat berharga. Jumlah cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan yang dapat diperhitungkan adalah maksimum sebesar 1,25% dari jumlah aktiva tertimbang menurut resiko.
3. Modal kuasi yang menurut BIS disebut *hybrid (debt/equity) capital instrumen*, yaitu modal yang didukung oleh instrumen atau warkat yang memiliki sifat seperti modal atau utang dan mempunyai ciri-ciri:

- a. Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan, dipersamakan dengan modal (*subordinated*) dan telah dibayar penuh.
 - b. Tidak dapat dilunasi atau ditarik atas inisiatif pemilik, tanpa persetujuan Bank Indonesia.
 - c. Mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal jumlah kerugian bank melebihi retained earnings dan cadangan-cadangan yang termasuk modal inti, meskipun bank belum dilikuidasi pembayaran bunga dapat ditangguhkan apabila bank dalam keadaan rugi atau laba tidak mendukung untuk membayar bunga tersebut.
 - d. Dalam pengertian modal kuasi ini termasuk cadangan modal yang berasal dari penyeteran modal yang efektif oleh pemilik bank yang belum didukung oleh modal dasar (yang sudah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang) yang mencukupi.
4. Pinjaman subordinasi, yaitu pinjaman yang mempunyai syarat-syarat sebagai berikut :
- a. Ada perjanjian tertulis antara bank dengan pemberi pinjaman.
 - b. Mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia. Dalam hubungan ini pada saat bank mengajukan permohonan persetujuan, bank harus menyampaikan program pembayaran kembali pinjaman subordinasi tersebut.
 - c. Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan dan telah dibayar penuh. Minimal berjangka waktu 5 (lima) tahun.

d. Pelunasan sebelum jatuh tempo harus mendapat persetujuan dari BI, dan dengan pelunasan tersebut permodalan bank tetap sehat.

Hak tagihnya dalam hal terjadinya likuidasi berlaku paling akhir dari segala pinjaman yang ada (kedudukannya sama dengan modal).

Jumlah pinjaman subordinasi yang diperhitungkan sebagai modal untuk sisa jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir adalah jumlah pinjaman subordinasi dikurangi amortisasi yang dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (prorata). Maksimum pinjaman subordinasi yang dapat dijadikan komponen modal pelengkap adalah sebesar 50% dari modal inti.

Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 4 Ayat 3 Surat Keputusan Direksi BI No. 23/67/KEP/DIR tanggal 28 februari 1991 di atas, seluruh modal pelengkap tersebut pada nomer 1 sampai dengan nomer 4 hanya dapat diperhitungkan sebagai modal yang setinggi-tingginya 100% dari jumlah modal inti.

2.2.2. Fungsi Modal Bank

Modal bank pada prinsipnya memiliki tiga macam fungsi utama yaitu:

1. Fungsi operasional
2. Fungsi perlindungan
3. Fungsi pengaturan.

Dari tiga fungsi utama tersebut, maka fungsi modal dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Untuk melindungi depositan dengan menyanggah semua kerugian atau bila terjadi insolvensi dan dilikuidasi, terutama bagi sumber dana yang tidak diasuransikan.

- b. Untuk memenuhi kebutuhan gedung, inventaris guna menunjang kegiatan operasional dan aktiva tidak produktif lainnya.
- c. Memenuhi ketentuan permodalan minimum yaitu untuk menutupi kemungkinan terjadi kerugian pada aktiva yang memiliki risiko yang tidak dapat diperkirakan sehingga operasi bank dapat tetap berjalan tanpa mengalami gangguan yang berarti.
- d. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat mengenai kemampuan bank memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo dan memberi keyakinan mengenai kelanjutan operasi bank meskipun terjadi kerugian.

Menurut Johnson and Johnson , modal bank mempunyai tiga fungsi. Pertama, sebagai penyangga untuk menyerap kerugian operasional dan kerugian lainnya. Dalam fungsi ini modal memberikan perlindungan terhadap kegagalan atau kerugian bank dan perlindungan terhadap kepentingan para deposan. Kedua, sebagai dasar bagi menetapkan batas maksimum pemberian kredit. Hal ini adalah merupakan pertimbangan operasional bagi bank sentral, sebagai regulator, untuk membatasi jumlah pemberian kredit kepada setiap individu nasabah bank. Melalui pembatasan ini bank sentral memaksa bank untuk melakukan diversifikasi kredit mereka agar dapat melindungi diri terhadap kegagalan kredit dari satu individu debitur. Ketiga, modal juga menjadi dasar perhitungan bagi para partisipan pasar untuk mengevaluasi tingkat kemampuan bank secara relatif untuk menghasilkan keuntungan. Tingkat keuntungan bagi para investor diperkirakan dengan membandingkan keuntungan bersih dengan ekuitas. Para partisipan pasar membandingkan return on investment diantara bank-bank yang ada.

Brenton C. Leavitt, staf Dewan Gubernur Federal Reserve , menekankan pada empat fungsi dari modal bank yaitu :

1. Untuk melindungi deposit yang tidak diasuransikan, pada saat bank dalam keadaan insolvable dan likuidasi
2. Untuk menyerap kerugian yang tidak diharapkan guna menjaga kepercayaan masyarakat bahwa bank dapat terus beroperasi.
3. Untuk memperoleh sarana fisik dan kebutuhan dasar lainnya yang diperlukan untuk menawarkan pelayanan bank.
4. Sebagai alat pelaksanaan peraturan pengendalian ekspansi aktiva yang tidak tepat.

Sehingga keseluruhan fungsi modal Bank tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Memberikan perlindungan kepada nasabah
- b. Modal bank dapat mencegah terjadinya kejatuhan bank
- c. Untuk memenuhi kebutuhan gedung kantor dan inventaris
- d. Untuk memenuhi ketentuan permodalan minimum
- e. Meningkatkan kepercayaan masyarakat
- f. Untuk menutupi kerugian aktiva produktif bank
- g. Sebagai indikator kekayaan bank
- h. Meningkatkan efisiensi operasional bank

2.3. Pengertian dan Jenis Pembiayaan pada Bank Syariah

2.3.1. Pengertian Pembiayaan

Pengertian pembiayaan selalu berkaitan dengan aktivitas bisnis. Bisnis adalah aktivitas yang mengarah kepada penambahan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengelolaan barang (produksi).

Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah di rencanakan. Dalam kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan syariah atau istilah teknisnya disebut sebagai aktiva produktif. Menurut ketentuan Bank Indonesia aktiva produktif adalah penanaman dana Bank syariah baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing dalam modal. penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada rekening administrative serta Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (Peraturan Bank Indonesia No.5/7/PBI/2003. Tujuan Bank Syariah dibedakan menjadi dua bagian yaitu tujuan pembiayaan mikro dan makro. Secara makro bertujuan untuk:

- a. Peningkatan Ekonomi Umat
- b. Meningkatkan Produktivitas
- c. Tersedianya Dana Bagi Peningkatan Usaha

Kalau secara mikro untuk:

1. Upaya memaksimalkan laba
2. Upaya memaksimalkan resiko
3. Pendayagunaan sumber ekonomi
4. Penyaluran kelebihan dana

Oleh karena itu tujuan pembiayaan yang dilaksanakan oleh Bank Syariah adalah untuk memenuhi kebutuhan stakeholder, yakni:

- a. Pemilik Dari sumber pendapatan diatas para pemilik modal mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank tersebut.
- b. Pegawai Para pegawai mengaharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari bank tersebut.
- c. Masyarakat
 - 1) Pemilik Dana Sebagaimana pemilik menharapkan dari dana yang diinvestasikan akan memperoleh bagi hasil
 - 2) Debitur yang bersangkutan Para debitur dengan penyediaan dana baginya mereka terbantu guna menjalankan usahanya
 - 3) Bank Bagi bank yang bersangkutan, dari penyaluran pembiayaan diharapkan bank dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya semakin luas.
- d. Pemerintah

Akibat penyediaan pembiayaan pemerintah terbantu dalam pembiayaan pembangunan negara, disamping memperoleh pajak penghasilan yang diperoleh bank dan perusahaan-perusahaan.

Fungsi Pembiayaan

1. Meningkatkan daya guna uang
2. Meningkatkan daya guna barang
3. Meningkatkan peredaran uang

4. Menimbulkan keghairahan usaha
5. Stabilisasi ekonomi

2.3.2. Macam-macam Kegiatan Pembiayaan pada Bank Syariah

1. Kredit Musyarakah

Yang dimaksud dengan *Musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

2. Kredit Mudharabah

Kredit *Mudharabah* adalah kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal (100%) sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal.

3. Al-Muzara'ah

Muzara'ah adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap dimana pemilik lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.

2.3.3. Kegiatan Pemberian Kredit atau Pembiayaan Pada Bank Syariah

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah antara lain pembiayaan

berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Dalam kegiatan bank syariah dikenal juga dengan nama pembiayaan atau yang biasa kita sebut dengan nama kredit. Pembiayaan atau kredit merupakan salah satu tugas pokok bank. Dalam bank syariah dikenal adanya dua macam pembiayaan yaitu pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif, sedangkan pembiayaan produktif juga dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Pembiayaan Modal Kerja
- b. Pembiayaan Investasi

Dalam masalah pembiayaan modal kerja, bank syariah dapat membantu memenuhi saluran kebutuhan modal kerja tersebut bukan dengan meminjam uang melainkan dengan menjalin hubungan *partnership* dengan nasabah, dimana bank bertindak sebagai penyandang dana (*shahibul maal*) sedangkan nasabah sebagai (*mudharib*) dan pembiayaan ini disebut dengan *mudharabah*. Kredit *Mudharabah* atau yang sering disebut sebagai pembiayaan total adalah pemberian kredit dengan sistem bagi hasil.

Sistem pembiayaan total (*Mudharabah*) adalah pembiayaan dimana pemilik modal menyerahkan hartanya kepada pekerja untuk diperdagangkan dan mereka berkongsi keuntungan dengan syarat-syarat yang telah disepakati bersama. Jenis

kredit *Mudharabah* ada dua macam yaitu mutlak (tidak terikat) dan *muqayyad* (terikat).

2.3.4. Resiko Perkreditan Akibat Pembiayaan bermasalah

Sebab-sebab pembiayaan bermasalah dapat berasal dari bank, pihak nasabah atau pihak eksternal.

a. Pihak Internal bank

Sebab pembiayaan bermasalah yang ditimbulkan oleh bank sendiri antara lain:

1) Kebijakan pembiayaan yang kurang tepat

Maksudnya adalah bank tidak lagi memperhitungkan kondisi kemampuan dalam menyalurkan pembiayaan dari kondisi perekonomian/kondisi sosial/politik, tingkat resiko maupun Sumber Daya Manusia (SDM). Keadaan ini memungkinkan terjadinya pembiayaan yang tidak memperhatikan prinsip *prudential banking practice*.

2) Kuantitas, kualitas dan integritas Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang memadai sehingga memungkinkan untuk terjadinya pembiayaan bermasalah contohnya adalah investigasi awal dan analisa pembiayaan tidak dilaksanakan secara mendalam.

3) Memberikan perlakuan khusus kepada nasabah yang kurang tepat atau berlebihan sehingga dapat terjadi pemberian pembiayaan hanya didasarkan atas agunan yang diserahkan tanpa memperhatikan kelayakan/proyek yang dibiayai.

- 4) Kelemahan organisasi dan sistem dan proses pembiayaan.
- 5) Sarana dan prasarana yang tersedia kurang mendukung baik yang berkaitan dengan teknis pekerjaan maupun administrasi

b. **Pembiayaan Bermasalah Yang Disebabkan Pihak Nasabah**

Pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh nasabah terdiri dari beberapa aspek sebagai berikut:

1) **Aspek Legal/Yuridis**

Maksudnya adalah bahwa persyaratan legal atas pembiayaan tidak dipenuhi, misalkan tidak dipenuhinya persyaratan ijin usaha yang diperlukan dan persyaratan status badan hukum.

2) **Aspek karakter**

Aspek karakter diantaranya adalah:

- a) Manajemen/pengurus perusahaan tidak capable/tidak profesional, misalkan tidak bisa memimpin, menggunakan power bisnis.
- b) Kesalahan dalam kebijakan pengembangan perusahaan seperti keberanian berspekulasi pada sektor yang beresiko tinggi.

3) **Aspek Finansial**

Aspek finansial ini contohnya adalah kesalahan dalam kebijakan pembelanjaan

4) **Aspek Agunan**

Aspek agunan ini contohnya adalah tidak ada agunan tambahan atau agunan yang diserahkan tidak mencukupi.

5) Aspek teknis/produksi

Aspek teknis ini diantaranya adalah target produksi tidak tercapai, tidak mampu memenuhi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau biaya produksi atau harga pokok penjualan tinggi.

6) Aspek pemasaran

Pada aspek ini contohnya adalah adanya pesaing-pesaing baru yang sangat potensial.

c. Pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh pihak eksternal

Pembiayaan bermasalah yang disebabkan faktor eksternal antara lain:

- 1) Krisis ekonomi/moneter atau perubahan makro ekonomi
- 2) Ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi ketentuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
- 3) Bencana alam/gangguan keamanan

2.3.5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan

1. Pengaruh ROA terhadap Pembiayaan

Peningkatan *Return on Asset* (ROA) dapat meningkatkan pembiayaan perbankan. Jika *Return on Asset* (ROA) yang dihasilkan tinggi maka bank telah menggunakan aktivasinya secara optimal untuk memperoleh pendapatan. Apabila *Return On Asset* (ROA) meningkat, berarti profitabilitas perusahaan meningkat, sehingga dampak akhirnya adalah peningkatan profitabilitas yang dinikmati oleh pemegang saham (Husnan, 1998).

2. Pengaruh CAR Terhadap Pembiayaan

Tingginya CAR mengindikasikan adanya sumber daya finansial (modal) yang *idle*. Dalam kondisi ini wajar jika bank-bank kemudian bertahan untuk tidak menyalurkan kredit karena kenaikan kredit yang disalurkan akan menambah aset berisiko sehingga mengharuskan bank menambah modal untuk memenuhi ketentuan CAR (Meydianawati,2007).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin besar CAR menunjukkan bahwa bank telah mempunyai modal yang cukup baik dalam menunjang kebutuhannya serta menanggung risiko-risiko yang ditimbulkan termasuk di dalamnya risiko kredit. Dengan modal yang besar maka suatu bank dapat menyalurkan kredit lebih banyak. Menurut Siamat (2003), fungsi utama modal bank memenuhi kebutuhan minimum dan untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko, misalnya kredit yang diberikan. Dengan kata lain, *Capital Adequacy Ratio* (CAR) merupakan tingkat kecukupan modal yang dimiliki bank dalam menyediakan dana dan untuk keperluan pengembangan usaha dan menampung risiko kerugian dana yang diakibatkan oleh kegiatan operasi bank. Tingkat kecukupan modal suatu bank sangat penting dalam menyalurkan kredit pada masyarakat.

3. Pengaruh NPF Terhadap Pembiayaan

Non performing Financing (NPF) mencerminkan risiko kemungkinan kerugian yang akan timbul atas penyaluran dana oleh bank. Tingginya NPF membuat bank perlu membentuk pencadangan atas kredit bermasalah yang lebih besar, hal ini akan menurunkan pendapatan bank. Menurunnya pendapatan bank akan berpengaruh terhadap menurunnya modal yang dimiliki oleh bank. karena

besarnya modal yang dimiliki oleh bank akan berpengaruh kepada besarnya ekspansi dalam penyaluran dana (pembiayaan).

4. Pengaruh FDR terhadap Pembiayaan

FDR yang memberikan pengaruh negatif terbukti dengan data yang menunjukkan semakin menurunnya rasio pada sektor konstruksi. FDR diduga memiliki pengaruh signifikan yang positif terhadap pembiayaan karena dilihat dari data yang ada, pembiayaan terus mengalami peningkatan. Selain itu, FDR merupakan dana yang digunakan untuk pembiayaan, maka seiring dengan meningkatnya FDR, akan meningkatkan pembiayaan itu sendiri.

5. Pengaruh BOPO terhadap Pembiayaan

BOPO termasuk rasio rentabilitas (*earnings*). Keberhasilan bank didasarkan pada penilaian kuantitatif terhadap rentabilitas bank dapat diukur dengan menggunakan rasio Biaya Operasional dibagi Pendapatan Operasional. Rasio biaya operasional digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Rasio Biaya Operasional dibagi Pendapatan Operasional (BOPO) sering disebut rasio efisiensi digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan Biaya Operasional dibagi Pendapatan Operasional. Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan

2.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Tinjauan Penelitian Terdahulu

Judul dan Nama Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Periode Tahun 2007 – 2013 Muhammad Luthfi Qolby (2013)	<i>Pembiayaan, Dana Pihak Ketiga (DPK), Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), Return On Assets (ROA)</i>	Kesimpulan dari penelitian ini adalah pada jangka panjang Dana Pihak Ketiga (DPK), Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) dan <i>Return On Assets</i> (ROA) berpengaruh secara statistik terhadap pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia. Pada jangka pendek <i>Return On Assets</i> (ROA) tidak berpengaruh secara statistik terhadap pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia. Sedangkan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) berpengaruh secara statistik terhadap pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia.
Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Di Indonesia Periode 2012.05 – 2015.04 Tri Budi Utami (2016)	Pembiayaan <i>Murabahah</i> , Dana Pihak Ketiga, <i>Financing to Deposit Ratio</i> , Inflasi, <i>Non Performing Financing</i> , dan Model Penyesuaian Parsial	Hasil penelitian dari uji t menunjukkan bahwa secara parsial DPK dan FDR memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan <i>Murabahah</i> , NPF memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Pembiayaan <i>Murabahah</i> sedangkan Inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pembiayaan <i>Murabahah</i> pada Bank Syariah di Indonesia. Dan dari hasil uji F secara simultan menunjukkan bahwa DPK, FDR, Inflasi dan NPF secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan <i>Murabahah</i> pada Bank Syariah di Indonesia pada periode 2012.05-2015.04.

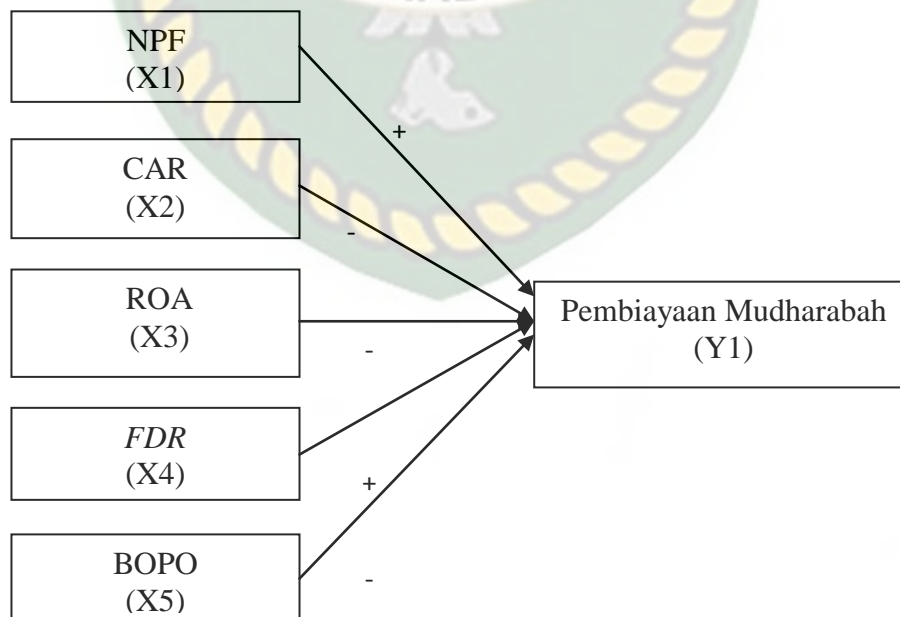
Judul dan Nama Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
<p>Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pembiayaan Perbankan (Studi Pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa)</p> <p>Saryadi (2012)</p>	<p>Pembiayaan, profit, CAR, KAP, ROA, BOPO, Likuiditas, LDR, NPL, DPK, dan Bunga Kredit.</p>	<p>Faktor-faktor yang diduga berpengaruh terhadap kemampuan bank menyalurkan kredit adalah profit, CAR, KAP, ROA, BOPO, Likuiditas, LDR, NPL, DPK, dan Bunga Kredit. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa pengaruh variabel bebas terhadap besarnya kredit yang disalurkan adalah: Profit 1,2%, KAP 0,3%, ROA 0,1%, LDR 30,9%, NPL 1,2%, DPK 72,4%, Bunga Kredit -2,1%, dan seluruh variabel bebas secara simultan 100%.</p>
<p>Faktor-Faktor yang Memengaruhi Besaran Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia</p> <p>Fauziyah Adzimatunur (2015)</p>	<p><i>DPK, Pembiayaan, Rasio Keuangan, Tingkat Bagi Hasil, VECM</i></p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam jangka panjang, tingkat bagi hasil, DPK, dan FDR memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan, sedangkan NPF memberikan pengaruh yang signifikan negatif. ROA dan BOPO tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan. Guncangan yang terjadi pada pembiayaan, NPF, dan ROA direspon positif oleh pembiayaan dan akan stabil dalam jangka panjang. Sedangkan guncangan yang terjadi pada tingkat bagi hasil, DPK, FDR, dan BOPO direspon negatif oleh pembiayaan dan akan stabil dalam jangka panjang.</p>
<p>Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Periode 2010-2014</p>	<p>Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil, <i>Financing to Deposit Ratio (FDR), Capital Adquacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF)</i>,</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan secara simultan, kelima variabel independen yaitu tingkat bagi hasil, FDR, CAR, NPF, dan SWBI berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil. Secara parsial, SWBI memiliki pengaruh positif signifikan terhadap</p>

Judul dan Nama Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
Aida Sania Asri (2016)	Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI)	pembiayaan berbasis bagi hasil dan CAR berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil, sedangkan tingkat bagi hasil, FDR dan NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil. Hasil estimasi regresi menunjukkan kemampuan prediksi model sebesar 70,2%, sedangkan sisanya sebesar 29,8% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model.

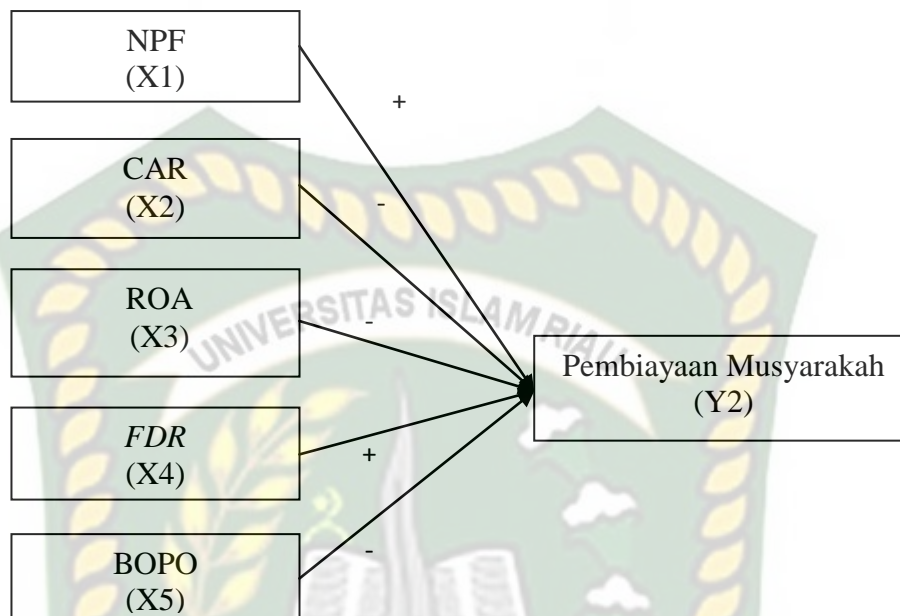
2.5. Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Penelitian Pembiayaan Mudharabah (Y1)



Gambar 2.1
Kerangka Penelitian Pembiayaan Musyarakah (Y2)



2.6. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang dan teori pendukung, maka dapat diambil hipotesis yaitu:

H₁: diduga secara parsial bahwa *Non Performing Finance* (NPF), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return On Asset* (ROA), *Financing To Deposit Ratio* (FDR), Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah.

H₂ : diduga secara simultan bahwa *Non Performing Finance* (NPF), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return On Asset* (ROA), *Financing To Deposit Ratio* (FDR), Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah.

H₃: diduga secara parsial bahwa *Non Performing Finance* (NPF), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return On Asset* (ROA), *Financing To Deposit*

Ratio (FDR), Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh terhadap pembiayaan musyarakah.

H₄ : diduga secara simultan bahwa *Non Performing Finance* (NPF), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return On Asset* (ROA), *Financing To Deposit Ratio* (FDR), Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh terhadap pembiayaan musyarakah.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah bank-bank syariah di Indonesia periode 2014-2018 dan mempunyai laporan keuangan yang lengkap. Data tersebut diperoleh dari publikasi bank umum syariah.

3.2. Operasional Variabel

Tabel 3.1
Operasional Variabel

No.	Variabel Dependen	Indikator	Pengukuran
1.	Y₁ Pembiayaan Mudharabah adalah akad jual beli antara bank dengan nasabah. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah dan menjual kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati. (Y ₁)	Log (Pembiayaan Mudharabah)	Rasio
2.	Y₂ Pembiayaan Musyarakah adalah akad kerjasama usaha patungan antara dua pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu jenis usaha yang halal dan produktif. Pendapatan atau keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati.	Log (Pembiayaan Musyarakah)	Rasio
No.	Variabel Independen	Indikator	Pengukuran
1.	X₁ <i>Non Performing Financing</i> (NPF) adalah kredit-kredit yang tidak memiliki <i>performance</i> yang baik dan	$\frac{\text{Pembiayaan}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$	Rasio

	diklasifikasikan sebagai kurang lancar, diragukan dan macet.		
2.	X₂ <i>Capital Adequacy Ratio (CAR)</i> atau Rasio Kecukupan Modal merupakan kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi dan kemampuan manajemen bank dalam mengidentifikasi, mengukur, mengawasi dan mengontrol risiko-risiko yang timbul yang dapat berpengaruh terhadap besarnya modal bank	$\frac{\text{Modal}}{\text{ATMR}} \times 100\%$	Rasio
3.	X₃ <i>Return On Asset (ROA)</i> yaitu rasio antara <i>Net Income After Tax</i> terhadap aset secara keseluruhan menunjukkan ukuran produktivitas aktiva dalam memberikan pengembalian pada penanaman modal	$\frac{\text{laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata-rata Total Aset}} \times 100\%$	Rasio
4.	X₄ FDR merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat.	$\frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$	
5.	X₅ BOPO adalah rasio digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan Biaya Operasional dibagi Pendapatan Operasional.	$\frac{\text{Beban Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$	Rasio

3.3. Populasi dan Sampel

1. Populasi yang diamati dalam penelitian ini adalah seluruh bank-bank syariah di Indonesia yang terdaftar di Bank Indonesia periode 2014-2018.

Berikut ini adalah daftar populasi Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan:

Tabel 3.2
Daftar Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan

No.	Nama Bank Umum Syariah
1	Bank Muamalat Indonesia
2	Bank Jabar Banten Syariah
3	BNI Syariah
4	Bank Syariah Mandiri
5	Bank Mega Syariah
6	BRI Syariah
7	Bukopin Syariah
8	Bank Panin Dubai Syariah
9	Bank Victoria Syariah
10	BCA syariah
11	Maybank Syariah
12	Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah
13	Bank Aceh Syariah

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, 2018

2. Sampel

Sampel adalah suatu prosedur pengambilan data dimana hanya sebagian populasi saja yang diambil dan dipergunakan untuk menentukan sifat serta ciri yang dikehendaki dari suatu populasi. Pemilihan sampel menggunakan metode *Purposive sampling* yaitu metode pemilihan sampel perusahaan yang memenuhi kriteria tertentu sesuai dengan yang dikehendaki peneliti.

Adapun kriteria pemilihan sampel penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bank Umum Syariah yang beroperasi di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau Bank Indonesia selama periode penelitian 2014-2018, tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dan Unit Usaha Syariah (UUS).

2. Bank Umum Syariah yang menyajikan laporan keuangan selama periode penelitian 2014-2018 dan telah dipublikasikan di website resmi bank umum syariah yang bersangkutan.
3. Bank Umum Syariah yang menyalurkan pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah

Berdasarkan dari kriteria pengambilan sampel diatas maka bank umum syariah yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini adalah:

Tabel 3.
Daftar Sampel Penelitian

No.	Nama Bank
1	Bank Bri Syariah
2	Bank Bni Syariah
3	Bank Syariah Mandiri
4	Bca Syariah
5	Bank Panin Syariah
6	Bank Victoria Syariah
7	Bank Syariah Bukopin

3.4. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data documenter yaitu berupa data laporan keuangan perusahaan jasa bank-bank syariah di Indonesia (BEI) periode 2014-2018. Data documenter adalah jenis data penelitian yang antara lain berupa : faktur, jurnal, sura-surat, notulen hasil rapat, memo, atau dalam bentuk laporan program.

b. Sumber data

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari data laporan keuangan tahunan Bank Umum Syariah berupa laporan keuangan dari tahun 2014-2018.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini dilakukan pengumpulan data dan informasi dengan menggunakan teknik sebagai berikut :

1. Pengumpulan data documenter, dimana proses pengumpulan data dilakukan dengan mengambil data yang berasal dari sumber kedua atau telah tersedia, seperti nama dan kode perusahaan yang termasuk dalam bank-bank syariah di Indonesia periode 2014-2018, laporan keuangan atau rasio keuangan yang menjadi sampel selama periode penelitian.
2. Studi kepustakaan, dimana penelitian ini juga dilakukan dengan membaca dan mempelajari berbagai literature yang berhubungan dengan masalah yang diteliti serta menganalisis laporan keuangan perusahaan bank-bank syariah di Indonesia periode 2014-2018.

3.6. Teknik Analisis Data

Sebelum analisis regresi dilakukan, terlebih dahulu dilakukan uji normalitas data dan uji asumsi klasik agar menghindari pembiasan data sehingga uji F dan uji t dapat dilakukan.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak. Sebelum menganalisis data maka terlebih dahulu dilakukan pengujian normalitas data. Normalitas data merupakan asumsi yang

sangat mendasar dalam analisis multivariate. Jika varian yang dihasilkan dari distribusi data yang tidak normal, maka tes statistic yang dihasilkan tidak valid. Uji normalitas data juga dibutuhkan dalam melakukan uji statistic F dan t.

Uji normalitas data menggunakan *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test* dengan melihat tingkat signifikan 5% untuk mengetahui metode uji beda statistik yang digunakan pada penelitian ini. Jika data tersebut normal, maka alat uji beda yang digunakan adalah uji statistik parametrik uji *Independent Sample T-Test*. Berikut ini adalah uji normalitas yang dilakukan dengan uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*.

b. Uji asumsi klasik

Dalam penggunaan regresi terdapat beberapa asumsi dasar yang dapat menghasilkan estimator linier tidak bias yang terbaik dari model regresi yang diperoleh dari metode kuadrat terkecil biasa. Penyimpangan terhadap asumsi-asumsi dasar tersebut dalam regresi akan menimbulkan beberapa masalah, ada 3 penyimpangan dasar yaitu:

1) Autokorelasi

Autokorelasi adalah korelasi (hubungan) yang terjadi antara anggota-anggota dari serangkaian pengamatan yang tersusun dalam serangkaian waktu (*time series data*) atau yang tersusun dalam rangkaian ruang observasi yang menggunakan data *time series*. Konsekuensi adanya varians sampel tidak dapat menggambarkan varians populasinya, dan model regresi yang dihasilkan tidak dapat digunakan untuk menaksir nilai variabel dependen pada nilai variabel independen tertentu.

Untuk menentukan dari tidak terjadinya autokorelasi dalam suatu model regresi tersebut adalah $du < d < 4 du$, dimana du adalah batas atas dari nilai d Durbin Watson yang terdapat pada nilai uji Durbin Watson. Sedangkan d merupakan nilai d Durbin Watson dari hasil perhitungan yang dilakukan.

Secara umum yang lebih mudah untuk mengidentifikasi suatu model regresi yang bebas dari pengaruh autokolerasi adalah dengan melihat pada patokan sebagai berikut :

- Jika angka Durbin Watson (DW) dibawah -2, berarti terdapat autokolerasi positif.
- Jika angka Durbin Watson (DW) diantara -2 sampai +2, berarti tidak terdapat autokolerasi.
- Jika angka Durbin Watson (DW) diatas +2, berarti ada autokolerasi negatif.

2) Multikolinieritas

Multikolinieritas adalah adanya suatu hubungan linier yang sempurna antara beberapa atau semua variabel independen. Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Pada program SPSS, ada beberapa metode yang sering digunakan untuk mendeteksi adanya multikolinieritas. Salah satunya adalah dengan cara mengamati nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *Tolerance*.

$$VIF = \frac{1}{(1-R^2)} = \frac{1}{Tolerance}$$

Dimana :

$$R^2 = Koefisie\ Determinasi$$

Dimana R^2 merupakan koefisien determinasi. Bila toleransi kecil artinya menunjukkan nilai VIF akan besar. Suatu variabel dikatakan memiliki multikolinieritas yang tinggi apabila memiliki VIF lebih besar dari 10 atau memiliki *tolerance* yang cenderung mendekati 0.

3) Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varian dari satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas, dengan kata lain jika terjadi heteroskedastisitas maka model tersebut kurang efisien.

Untuk mengetahui apakah terjadi masalah multikolinieritas pada suatu model regresi dapat dilihat pada grafik *Scatter Plot*. Jika sebaran datanya terletak menyebar tidak beraturan dan tidak membentuk suatu pola (seperti titik, garis, maupun diagonal) maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut bebas dari masalah multikolinieritas. Tetapi sebaliknya jika sebaran datanya terletak tidak menyebar dan membentuk suatu pola (seperti titik, garis, maupun diagonal) maka dapat disimpulkan model regresi tersebut tidak bebas dari masalah multikolinieritas.

- Menghitung koefisien korelasi parsial (r) untuk mengetahui seberapa kuat hubungan setiap variabel bebas dengan variabel terikat secara terpisah (individu).
- Menghitung koefisien korelasi berganda (R) untuk mengetahui keeratan hubungan antara variabel-variabel bebas dengan variabel terikat secara bersama-sama.
- Menghitung koefisien determinasi berganda (R^2) untuk mengukur seberapa besar variasi dari variabel bebas mampu menjelaskan variabel terikat secara bersama-sama.

c. Regresi Berganda

Untuk memperoleh kesimpulan dari analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda adalah teknik statistik melalui koefisien parameter untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian hipotesis baik secara parsial maupun simultan, dilakukan setelah model regresi yang digunakan bebas dari pelanggaran asumsi klasik. Tujuannya adalah agar hasil penelitian dapat diinterpretasikan secara tepat dan efisien.

Persamaan regresi tersebut adalah sebagai berikut :

$$Y_1 = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + e$$

$$Y_2 = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + e$$

Dimana:

Y_1 : Pembiayaan Mudharabah

Y_2 : Pembiayaan Musyarakah

a : Konstanta

b : Koefisien Regresi

$b_{(1,2,3)}$: Koefisien Regresi

X_1 : NPF

X_2 : CAR

X_3 : ROA

X_4 : FDR

X_5 : BOPO

e : Standar Error

d. Pengujian Hipotesis

Maka terlebih dahulu dilakukan pengujian hipotesis yang dilakukan secara menyeluruh atau simultan (uji F) dan secara parsial (uji t).

1. Uji simultan (uji F)

Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh variable-variebel bebas (independen) secara bersama-sama terhadap variable terikat (dependen). Rumusan hipotesisnya adalah sebagai berikut :

$H_0: \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$: Tidak berpengaruh yang signifikan dari faktor-faktor yang mempengaruhi Pembiayaan Pada Bank-bank Syariah di Indonesia.

$H_a: \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq 0$: Terdapat pengaruh yang signifikan dari faktor-faktor yang mempengaruhi Pembiayaan Pada Bank-bank Syariah di Indonesia.

Analisi Uji F dengan rumus :

$$F_{hitung} = \frac{R^2 / k-1}{1-R^2 / n-k}$$

Dimana :

R^2 = koefisien determinasi

k = jumlah variabel

n = jumlah sampel

Menentukan F_{hitung} dan F_{tabel} :

- Jika $F_{hitung} \leq -F_{tabel}$ atau $F_{hitung} \geq F_{tabel}$ maka H_a diterima karena terdapat pengaruh signifikan.
- Jika $F_{hitung} \geq -F_{tabel}$ atau $F_{hitung} \leq F_{tabel}$, maka H_a ditolak karena tidak terdapat pengaruh signifikan.

Menentukan tingkat signifikansi dengan $\alpha = 5\%$. Untuk menentukan nilai F_{tabel} harus ditentukan dengan tingkat kepercayaan $(1-\alpha)$ dan derajat kebebasan $(df) = (k-1)$ dan $(n-k)$ agar dapat ditentukan nilai kritisnya.

2. Uji parsial (uji t)

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh variable-variabel independen secara individual terhadap variable dependen (Y).

Rumusan hipotesisnya sebagai berikut :

- $H_0 : \beta_1 = 0$: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari faktor-faktor yang mempengaruhi Pembiayaan Pada Bank-bank Syariah di Indonesia.

$H_a : \beta_1 \neq 0$: Terdapat pengaruh yang signifikan dari faktor-faktor yang mempengaruhi Pembiayaan Pada Bank-bank Syariah di Indonesia.

- $H_0 : \beta_2 = 0$: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari faktor-faktor yang mempengaruhi Pembiayaan Pada Bank-bank Syariah di Indonesia.

$H_a : \beta_2 \neq 0$: Terdapat pengaruh yang signifikan dari faktor-faktor yang mempengaruhi Pembiayaan Pada Bank-bank Syariah di Indonesia.

Analisis uji t dengan rumus :

$$T_{\text{hitung}} = \frac{\text{Koefisien Regresi (b1)}}{\text{Standar Deviasi (Sb1)}}$$

Menentukan t_{hitung} dan t_{tabel} :

- Jika $t_{\text{hitung}} \leq -t_{\text{tabel}}$ atau $t_{\text{hitung}} \geq t_{\text{tabel}}$, maka H_a diterima karena terdapat pengaruh signifikan.
- Jika $t_{\text{hitung}} \geq -t_{\text{tabel}}$ atau $t_{\text{hitung}} \leq t_{\text{tabel}}$, maka H_a ditolak karena tidak terdapat pengaruh signifikan.

e. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi ini menunjukkan persentase pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen. Persentase tersebut menunjukkan seberapa besar variabel independen (tingkat keuntungan dan tingkat pertumbuhan) dapat menjelaskan variabel dependen (cash dividen). Nilai R^2 berkisar antara 0 – 1, dimana semakin dekat nilai tersebut dengan 1, maka semakin besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, begitu sebaliknya.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

4.1. Sejarah Bank Syariah di Indonesia

Deregulasi perbankan dimulai sejak tahun 1983. Pada tahun tersebut, BI memberikan keleluasaan kepada bank-bank untuk menetapkan suku bunga. Pemerintah berharap dengan kebijakan deregulasi perbankan maka akan tercipta kondisi dunia perbankan yang lebih efisien dan kuat dalam menopang perekonomian. Pada tahun 1983 tersebut pemerintah Indonesia pernah berencana menerapkan "sistem bagi hasil" dalam perkreditan yang merupakan konsep dari perbankan syariah.

Pada tahun 1988, Pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Deregulasi Perbankan 1988 (Pakto 88) yang membuka kesempatan seluas-luasnya kepada bisnis perbankan harus dibuka seluas-luasnya untuk menunjang pembangunan (liberalisasi sistem perbankan). Meskipun lebih banyak bank konvensional yang berdiri, beberapa usaha-usah perbankan yang bersifat daerah yang berasaskan syariah juga mulai bermunculan. Inisiatif pendirian bank Islam Indonesia dimulai pada tahun 1980 melalui diskusi-diskusi bertemakan bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Sebagai uji coba, gagasan perbankan Islam dipraktekkan dalam skala yang relatif terbatas di antaranya di Bandung (Bait At-Tamwil Salman ITB) dan di Jakarta (Koperasi *Ridho Gusti*).

Tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Pada tanggal 18 – 20 Agustus 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan

perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI di Jakarta 22 – 25 Agustus 1990, yang menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja dimaksud disebut Tim Perbankan MUI dengan diberi tugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang terkait. Sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI tersebut adalah berdirilah bank syariah pertama di Indonesia yaitu PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang sesuai akte pendiriannya, berdiri pada tanggal 1 Nopember 1991. Sejak tanggal 1 Mei 1992, BMI resmi beroperasi dengan modal awal sebesar Rp 106.126.382.000,-

Pada awal masa operasinya, keberadaan bank syariah belumlah memperoleh perhatian yang optimal dalam tatanan sektor perbankan nasional. Landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah, saat itu hanya diakomodir dalam salah satu ayat tentang "bank dengan sistem bagi hasil" pada UU No. 7 Tahun 1992; tanpa rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan.

Pada tahun 1998, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat melakukan penyempurnaan UU No. 7/1992 tersebut menjadi UU No. 10 Tahun 1998, yang secara tegas menjelaskan bahwa terdapat dua sistem dalam perbankan di tanah air (*dual banking system*), yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Peluang ini disambut hangat masyarakat perbankan, yang ditandai dengan berdirinya beberapa Bank Islam lain, yakni Bank IFI, Bank Syariah Mandiri,

Bank Niaga, Bank BTN, Bank Mega, Bank BRI, Bank Bukopin, BPD Jabar dan BPD Aceh dll.

Pengesahan beberapa produk perundangan yang memberikan kepastian hukum dan meningkatkan aktivitas pasar keuangan syariah, seperti: (i) UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; (ii) UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (sukuk); dan (iii) UU No.42 tahun 2009 tentang Amandemen Ketiga UU No.8 tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa. Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan. Lahirnya UU Perbankan Syariah mendorong peningkatan jumlah BUS dari sebanyak 5 BUS menjadi 11 BUS dalam kurun waktu kurang dari dua tahun (2009-2010).

Sejak mulai dikembangkannya sistem perbankan syariah di Indonesia, dalam dua dekade pengembangan keuangan syariah nasional, sudah banyak pencapaian kemajuan, baik dari aspek lembaga dan infrastruktur penunjang, perangkat regulasi dan sistem pengawasan, maupun *awareness* dan literasi masyarakat terhadap layanan jasa keuangan syariah. Sistem keuangan syariah kita menjadi salah satu sistem terbaik dan terlengkap yang diakui secara internasional.

Per Juni 2015, industri perbankan syariah terdiri dari 12 Bank Umum Syariah, 22 Unit Usaha Syariah yang dimiliki oleh Bank Umum Konvensional dan 162 BPRS dengan total aset sebesar Rp. 273,494 Triliun dengan pangsa pasar 4,61%. Khusus untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta, total aset gross, pembiayaan, dan Dana Pihak Ketiga (BUS dan UUS) masing-masing sebesar Rp. 201,397 Triliun, Rp. 85,410 Triliun dan Rp. 110,509 Triliun.

Pada akhir tahun 2013, fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan berpindah dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan. Maka pengawasan dan pengaturan perbankan syariah juga beralih ke OJK. OJK selaku otoritas sektor jasa keuangan terus menyempurnakan visi dan strategi kebijakan pengembangan sektor keuangan syariah yang telah tertuang dalam Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019 yang diluncurkan pada Pasar Rakyat Syariah 2014. Roadmap ini diharapkan menjadi panduan arah pengembangan yang berisi inisiatif-inisiatif strategis untuk mencapai sasaran pengembangan yang ditetapkan.

4.2. Gambaran Umum Bank Syariah

4.2.1. BRI Syariah

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya o.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT Bank BRI syariah Tbk secara resmi beroperasi. Kemudian PT Bank BRI syariah Tbk merubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam.

Dua tahun lebih PT Bank BRI Syariah Tbk hadir mempersembahkan sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan prima (service excellence) dan menawarkan beragam produk yang sesuai harapan nasabah dengan prinsip syariah. Kehadiran PT Bank BRI Syariah Tbk di tengah-tengah industri perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas PT Bank BRI Syariah Tbk yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Kombinasi warna yang digunakan merupakan turunan dari warna biru dan putih sebagai benang merah dengan brand PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.,

Aktivitas PT Bank BRI Syariah Tbk semakin kokoh setelah pada 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., untuk melebur ke dalam PT Bank BRI Syariah Tbk (proses spin off) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT Bank BRI Syariah Tbk.

Saat ini PT Bank BRI Syariah Tbk menjadi bank syariah ketiga terbesar berdasarkan aset. PT Bank BRI Syariah Tbk tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada

segmen menengah bawah, PT Bank BRI Syariah Tbk menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan.

Sesuai dengan visinya, saat ini PT Bank BRI Syariah Tbk merintis sinergi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dengan memanfaatkan jaringan kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., sebagai Kantor Layanan Syariah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan konsumen berdasarkan prinsip Syariah.

4.2.2. BNI Syariah

Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip Syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu adil, transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada Undang-undang No.10 Tahun 1998, pada tanggal tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu.

Disamping itu nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di Kantor Cabang BNI Konvensional (office channelling) dengan lebih kurang 1500 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di dalam pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. Dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang saat ini diketuai oleh KH.Ma'ruf

Amin, semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan syariah.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha kepada PT Bank BNI Syariah. Dan di dalam Corporate Plan UUS BNI tahun 2003 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan spin off tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu spin off bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Disamping itu, komitmen Pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat. Juni 2014 jumlah cabang BNI Syariah mencapai 65 Kantor Cabang, 161 Kantor Cabang Pembantu, 17 Kantor Kas, 22 Mobil Layanan Gerak dan 20 Payment Point.

4.2.3. Bank Syariah Mandiri

Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri

perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (merger) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB. Sebagai tindak lanjut dari keputusan merger, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (dual banking system).

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999. Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No.

1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.

PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.

4.2.4. BCA Syariah

PT. Bank BCA Syariah berdiri dan mulai melaksanakan kegiatan usaha dengan prinsip-prinsip syariah setelah memperoleh izin operasi syariah dari Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Gubernur BI No. 12/13/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 2 Maret 2009 dan kemudian resmi beroperasi sebagai bank syariah pada hari Senin tanggal 5 April 2010. Komposisi kepemilikan saham PT Bank BCA Syariah adalah sebagai berikut :

1. PT Bank Central Asia Tbk.: 99.9999%
2. PT BCA Finance : 0.0001%

Perkembangan perbankan syariah yang tumbuh cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan minat masyarakat mengenai ekonomi syariah semakintambah. Untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan layanan syariah, maka

berdasarkan akta Akuisisi No. 72 tanggal 12 Juni 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., Msi, .PT.Bank Central Asia, Tbk (BCA) mengakuisisi PT Bank Utama Internasional Bank (Bank UIB) yang nantinya menjadi PT. Bank BCA Syariah.

Selanjutnya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Perseroan Terbatas PT Bank UIB No. 49 yang dibuat dihadapan Notaris Pudji Rezeki Irawati, S.H., tanggal 16 Desember 2009, tentang perubahan kegiatan usaha dan perubahan nama dari PT Bank UIB menjadi PT Bank BCA Syariah. Akta perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. AHU-01929. AH.01.02 tanggal 14 Januari 2010. Pada tanggal yang sama telah dilakukan penjualan 1 lembar saham ke BCA Finance, sehingga kepemilikan saham sebesar 99,9997% dimiliki oleh PT Bank Central Asia Tbk, dan 0,0003% dimiliki oleh PT BCA Finance. Perubahan kegiatan usaha Bank dari bank konvensional menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui Keputusan Gubernur BI No. 12/13/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 2 Maret 2010. Dengan memperoleh izin tersebut, pada tanggal 5 April 2010, BCA Syariah resmi beroperasi sebagai bank umum syariah.

BCA Syariah mencanangkan untuk menjadi pelopor dalam industri perbankan syariah Indonesia sebagai bank yang unggul di bidang penyelesaian pembayaran, penghimpun dana dan pembiayaan bagi nasabah bisnis dan perseorangan. Masyarakat yang menginginkan produk dan jasa perbankan yang berkualitas serta ditunjang oleh kemudahan akses dan kecepatan transaksi

merupakan target dari BCA Syariah. Komitmen penuh BCA sebagai perusahaan induk dan pemegang saham mayoritas terwujud dari berbagai layanan yang bisa dimanfaatkan oleh nasabah BCA Syariah pada jaringan cabang BCA yaitu setoran (pengiriman uang) hingga tarik tunai dan debit di seluruh ATM dan mesin EDC (Electronic Data Capture) milik BCA, semua tanpa dikenakan biaya. Selanjutnya, untuk mendapatkan informasi maupun menyampaikan pengaduan dan keluhan, masyarakat dan nasabah khususnya dapat menghubungi HALO BCA di 1500888.

BCA Syariah hingga saat ini memiliki 64 jaringan cabang yang terdiri dari 11 Kantor Cabang (KC), 12 Kantor Cabang Pembantu (KCP), 3 Kantor Fungsional (KF) dan 38 Unit Layanan Syariah (ULS) yang tersebar di wilayah DKI Jakarta, Tangerang, Bogor, Depok, Bekasi, Surabaya, Semarang, Bandung, Solo, Yogyakarta, Medan, Palembang dan Malang (data per Des 2018).

4.2.5. Panin Bank Syariah

PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk (“Panin Dubai Syariah Bank”), berkedudukan di Jakarta dan berkantor pusat di Gedung Panin Life Center, Jl. Letjend S. Parman Kav. 91, Jakarta Barat. Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Panin Dubai Syariah Bank, ruang lingkup kegiatan Panin Dubai Syariah Bank adalah menjalankan kegiatan usaha di bidang perbankan dengan prinsip bagi hasil berdasarkan syariat Islam. Panin Dubai Syariah Bank mendapat ijin usaha dari Bank Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.11/52/KEP.GBI/DpG/2009 tanggal 6 Oktober 2009 sebagai bank umum

berdasarkan prinsip syariah dan mulai beroperasi sebagai Bank Umum Syariah pada tanggal 2 Desember 2009.

Panin Dubai Syariah Bank hadir untuk melayani dan memenuhi kebutuhan transaksi syariah seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Perbankan syariah Indonesia adalah perbankan yang modern, terbuka bagi semua segmen masyarakat dan melayani seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali, baik muslim maupun non muslim. Perbankan Syariah dengan logo iB (baca ai-Bi) adalah ikon atau singkatan dari Islamic Banking (di Indonesia dikenal dengan Perbankan Syariah) dengan menawarkan produk serta jasa bank yang lebih beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi. Produk titipan maupun investasi Panin Dubai Syariah Bank dijamin sesuai dengan Undang-Undang No.24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) hingga nilai maksimal Rp.2 miliar.

Visi Panin Bank Syariah menjadi Bank Syariah progresif di Indonesia yang menawarkan produk dan layanan keuangan komprehensif dan inovatif untuk semua. Sedangkan misi Panin Bank Syariah antara lain :

- a. Menyediakan produk dan layanan yang kreatif, komprehensif dan inovatif sesuai dengan kebutuhan nasabah
- b. Berkontribusi dalam pertumbuhan industri perbankan Syariah di Indonesia
- c. Mengembangkan kompetensi SDI sejalan dengan kebutuhan industri melalui pelatihan dan pemenuhan tenaga ahli perbankan syariah

- d. Menerapkan kerangka kerja tata kelola perusahaan dan pengendalian internal yang kuat dalam rangka perlindungan nasabah dan para pemangku kepentingan.
- e. Menciptakan nilai bagi *shareholder*

4.2.6. Bank Victoria Syariah

PT. Bank Victoria Syariah didirikan untuk pertama kalinya dengan nama PT Bank Swaguna berdasarkan Akta Nomor 9 tanggal 15 April 1966. Akta tersebut kemudian diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 4 tanggal 5 September 1967 yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (d/h Menteri Kehakiman) berdasarkan Surat Keputusan Nomor: JA.5/79/5 tanggal 7 November 1967 dan telah didaftarkan pada Daftar Perusahaan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri I di Cirebon masing-masing di bawah Nomor 1/1968 dan Nomor 2/1968 pada tanggal 10 Januari 1968, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42 tanggal 24 Mei 1968. Tambahan Nomor 62.

Selanjutnya, PT Bank Swaguna diubah namanya menjadi PT Bank Victoria Syariah sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 5 tanggal 6 Agustus 2009 yang dibuat dihadapan Erni Rohainin SH, MBA, Notaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang berkedudukan di Jakarta Selatan. Perubahan tersebut telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Nomor : AHU-02731.AH.01.02 tahun 2010 tanggal 19 Januari 2010, Serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 83 tanggal 15 Oktober 2010. Tambahan Nomor 31425.

Terakhir, Anggaran Dasar PT Bank Victoria Syariah diubah dengan Akta Nomor 45 tanggal 30 Maret 2010 yang dibuat dihadapan Sugih Haryati, SH, MKn sebagai pengganti dari Notaris Erni Rohaini, SH, MBA, Notaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang berkedudukan di Jakarta Selatan. Perubahan Anggaran Dasar tersebut ditujukan untuk merubah pasal 10 ayat 3. Perubahan tersebut telah diterima dan di catat dalam database Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Nomor: AHU-AH.01.10-16130 tanggal 29 Juni 2010.

Perubahan kegiatan usaha Bank Victoria Syariah dari Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah telah mendapatkan izin dari Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 12/8/KEP.GBI/DpG/2010 tertanggal 10 Februari 2010. Bank Victoria Syariah mulai beroperasi dengan prinsip syariah sejak tanggal 1 April 2010. Adapun kepemilikan saham Bank Victoria pada Bank Victoria Syariah adalah sebesar 99.99% Dukungan penuh dari perusahaan induk PT Bank Victoria International Tbk telah membantu tumbuh kembang Bank Victoria Syariah yang selalu terus berkomitmen untuk membangun kepercayaan nasabah dan masyarakat melalui pelayanan dan penawaran produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta memenuhi kebutuhan nasabah.

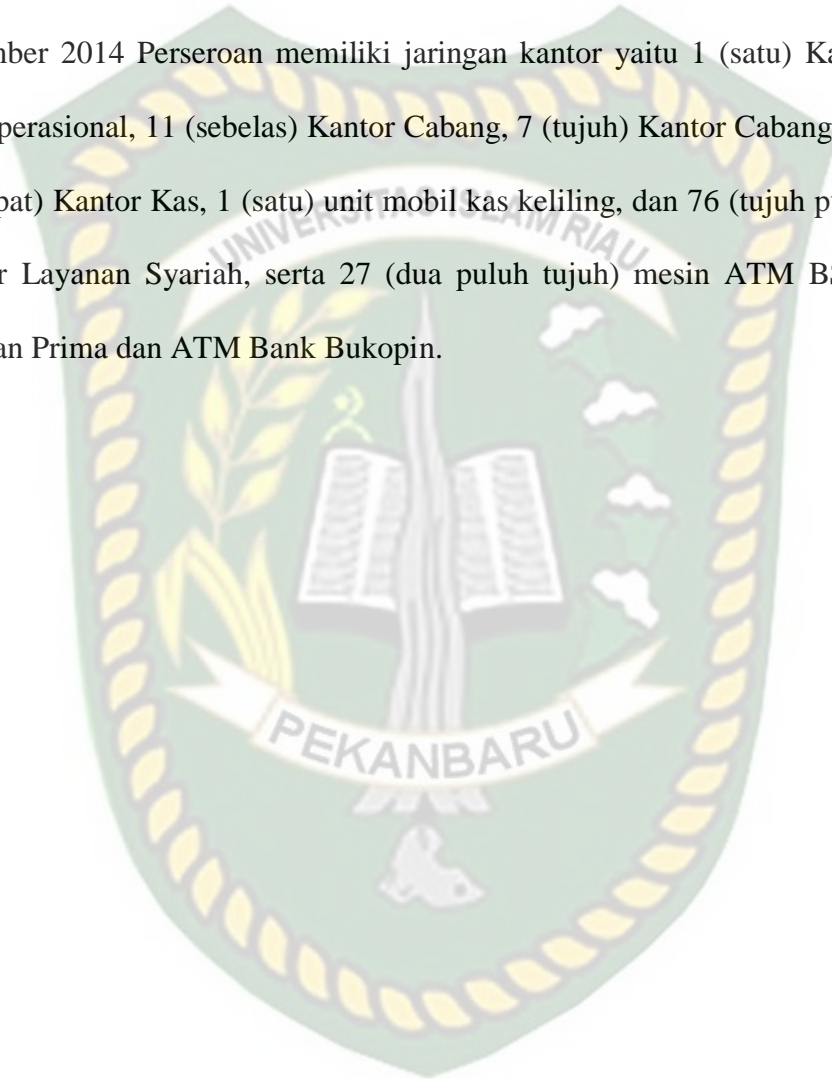
4.2.7. Bank Bukopin Syariah

PT Bank Syariah Bukopin (selanjutnya disebut Perseroan) sebagai bank yang beroperasi dengan prinsip syariah yang bermula masuknya konsorsium PT Bank Bukopin, Tbk diakuisisinya PT Bank Persyarikatan Indonesia (sebuah bank

konvensional) oleh PT Bank Bukopin, Tbk., proses akuisisi tersebut berlangsung secara bertahap sejak 2005 hingga 2008, dimana PT Bank Persyarikatan Indonesia yang sebelumnya bernama PT Bank Swansarindo Internasional didirikan di Samarinda, Kalimantan Timur berdasarkan Akta Nomor 102 tanggal 29 Juli 1990 merupakan bank umum yang memperoleh Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 1.659/ KMK.013/1990 tanggal 31 Desember 1990 tentang Pemberian Izin Peleburan Usaha 2 (dua) Bank Pasar dan Peningkatan Status Menjadi Bank Umum dengan nama PT Bank Swansarindo Internasional yang memperoleh kegiatan operasi berdasarkan surat Bank Indonesia (BI) nomor 24/1/UPBD/PBD2/Smr tanggal 1 Mei 1991 tentang Pemberian Izin Usaha Bank Umum dan Pemindahan Kantor Bank.

Pada tahun 2001 sampai akhir 2002 proses akuisisi oleh Organisasi Muhammadiyah dan sekaligus perubahan nama PT Bank Swansarindo Internasional menjadi PT Bank Persyarikatan Indonesia yang memperoleh persetujuan dari (BI) nomor 5/4/KEP. DGS/2003 tanggal 24 Januari 2003 yang dituangkan ke dalam akta nomor 109 Tanggal 31 Januari 2003. Dalam perkembangannya kemudian PT Bank Persyarikatan Indonesia melalui tambahan modal dan asistensi oleh PT Bank Bukopin, Tbk., maka pada tahun 2008 setelah memperoleh izin kegiatan usaha bank umum yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia nomor 10/69/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 27 Oktober 2008 tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah, dan Perubahan Nama PT Bank Persyarikatan Indonesia Menjadi PT Bank Syariah

Bukopin dimana secara resmi mulai efektif beroperasi tanggal 9 Desember 2008, kegiatan operasional Perseroan secara resmi dibuka oleh Bapak M. Jusuf Kalla, Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2004 -2009. Sampai dengan akhir Desember 2014 Perseroan memiliki jaringan kantor yaitu 1 (satu) Kantor Pusat dan Operasional, 11 (sebelas) Kantor Cabang, 7 (tujuh) Kantor Cabang Pembantu, 4 (empat) Kantor Kas, 1 (satu) unit mobil kas keliling, dan 76 (tujuh puluh enam) Kantor Layanan Syariah, serta 27 (dua puluh tujuh) mesin ATM BSB dengan jaringan Prima dan ATM Bank Bukopin.



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai hasil analisis data dengan metode penelitian yang digunakan. Sehingga perumusan masalah pada bab I akan dapat dijawab melalui hasil pengujian tersebut.

5.1. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian

Populasi dalam objek penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Statistik deskriptif berguna untuk melihat distribusi pemusatan dan penyebaran data. Distribusi pemusatan data digunakan ukuran rata-rata. Rata-rata ini merupakan ukuran tunggal untuk melihat dimana data berpusat. Ukuran penyebaran data dapat diketahui dari nilai minimum dan maksimum. Berikut adalah statistik deskriptif pembiayaan dan kinerja keuangan Bank Umum Syariah.

5.1.1. Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah adalah akad antara pemilik dana dengan pengelola untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal akad.

Berikut ini data Pembiayaan Musyarakah Bank-bank Syariah di Indonesia Pada Tahun 2014-2018.

Tabel 5.1
Pembiayaan Mudharabah Bank Umum Syariah
Tahun 2014-2018 (jutaan rupiah)

No.	Nama Bank	2014	2015	2016	2017	2018
1	Bank Bri Syariah	876.311	1.106.566	1.271.485	840.974	475.300
2	Bank Bni Syariah	1.016.696	1.258.682	1.181.607	870.114	933.549
3	Bca Syariah	13.651	10.173	342.363	223.322	236.056
4	Bank Syariah Mandiri	3.006.253	2.834.183	3.085.615	3.360.363	3.226.605
5	Bank Victoria Syariah	13.902	4.514	20.007	63.486	56.080
6	Bank Syariah Bukopin	264.504	401.915	340.450	184.961	108.864
7	Bank Panin Syariah	854.377	1.018.378	586.840	533.090	210.003

Sumber : Laporan Keuangan Bank Syariah, 2019

Dari data tersebut bahwa pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Syariah dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Jenis pembiayaan pada bank syariah ini adalah pembiayaan mudharabah. Pembiayaan paling besar dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri dan pembiayaan paling kecil oleh BCA Syariah. Seluruh pembiayaan yang disalurkan sebagian besar berasal dari pembiayaan dengan pola bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*). Keuntungan usaha *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal.

5.1.2. Pembiayaan Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerjasama usaha patungan antara dua pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu jenis usaha yang halal dan produktif. Pendapatan atau keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati.

Berikut ini data Pembiayaan Musyarakah Bank-bank Syariah di Indonesia Pada Tahun 2014-2018.

Tabel 5.2
Pembiayaan Musyarakah Bank Umum Syariah Tahun 2014-2018 (jutaan rupiah)

No.	Nama Bank	2014	2015	2016	2017	2018
1	Bank Bri Syariah	4.005.308	4.962.346	5.185.890	5.447.998	7.406.955
2	Bank Bni Syariah	1.405.003	2.100.125	2.907.463	4.444.876	7.106.936
3	Bca Syariah	280.055	330.657	1.287.827	1.807.939	2.390.999
4	Bank Syariah Mandiri	3.703.698	10.277.268	13.001.058	17.268.075	20.622.671
5	Bank Victoria Syariah	571.502	703.899	908.937	855.806	917.996
6	Bank Syariah Bukopin	1.169.237	1.636.389	2.137.001	2.566.956	2.589.544
7	Bank Panin Syariah	3.252.749	4.074.372	4.655.729	5.022.793	5.465.099

Sumber : Laporan Keuangan Bank Syariah, 2019

Dari data tersebut bahwa pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Syariah dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Jenis pembiayaan pada bank syariah ini adalah pembiayaan musyarakah. Pembiayaan paling besar dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri dan pembiayaan paling kecil oleh BCA Syariah dan bank Victoria syariah. *Musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

5.1.3. Non Performing Finance (NPF)

Non performing Financing (NPF) mencerminkan risiko kemungkinan kerugian yang akan timbul atas penyaluran dana oleh bank. Tingginya NPF membuat bank perlu membentuk pencadangan atas kredit bermasalah yang lebih besar, hal ini akan menurunkan pendapatan bank. Menurunnya pendapatan bank akan berpengaruh terhadap menurunnya modal yang dimiliki oleh bank. karena

besarnya modal yang dimiliki oleh bank akan berpengaruh kepada besarnya ekspansi dalam penyaluran dana (pembiayaan).

Berikut ini data *Non performing Financing* (NPF) bank umum syariah tahun 2014-2018.

Tabel 5.3
***Non performing Financing* (NPF) Bank Umum Syariah Tahun 2014-2018**
(jutaan rupiah)

No.	Nama Bank	2014	2015	2016	2017	2018
1	Bank Bri Syariah	3,65	3,89	3,19	4,72	4,97
2	Bank Bni Syariah	1,04	1,46	1,64	1,50	2,93
3	Bca Syariah	0,10	0,50	0,20	0,04	0,28
4	Bank Syariah Mandiri	4,29	4,05	3,13	2,71	1,56
5	Bank Victoria Syariah	4,75	4,82	4,35	4,08	3,46
6	Bank Syariah Bukopin	3,34	2,74	4,66	4,18	3,65
7	Bank Panin Syariah	0,29	1,94	1,86	4,83	3,84

Sumber : Laporan Keuangan Bank Syariah, 2019

Dari data NPF diatas dari tahun 2014-2018 mengalami fluktuasi. Pada bank BRI Syariah NPF terendah pada tahun 2016, pada bank BNI Syariah NPF terendah pada tahun 2014, pada bank BCA Syariah NPF terendah pada tahun 2017, pada bank Syariah Mandiri NPF terendah pada tahun 2018, pada bank Victoria Syariah pada tahun 2018, dan pada bank syariah bukopin NPF terendah pada tahun 2015 serta pada bank Panin Syariah NPF terendah pada tahun 2014.

5.1.4. *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan rasio permodalan yang menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha dan menampung risiko kerugian dana yang diakibatkan oleh kegiatan operasi bank. Bank Indonesia menetapkan CAR yang dimiliki oleh bank minimal 8%. Apabila ketentuan CAR tidak terpenuhi, maka akan

mempengaruhi tingkat kesehatan bank dan akan mengurangi kemampuan ekspansi penyaluran dana.

Berikut ini data *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Bank Umum Syariah Tahun 2014-2018.

Tabel 5.4
Capital Adequacy Ratio (CAR) Bank Umum Syariah Tahun 2014-2018
(jutaan rupiah)

No.	Nama Bank	2014	2015	2016	2017	2018
1	Bank Bri Syariah	12,89	13,94	20,63	20,29	29,72
2	Bank Bni Syariah	16,26	15,48	14,92	20,14	19,31
3	Bca Syariah	29,60	34,30	36,70	29,40	24,3
4	Bank Syariah Mandiri	14,12	12,85	14,01	15,89	16,26
5	Bank Victoria Syariah	15,27	16,14	15,98	19,29	22,07
6	Bank Syariah Bukopin	14,8	16,31	15,15	19,2	19,31
7	Bank Panin Syariah	25,69	20,30	18,17	11,51	23,15

Sumber : Laporan Keuangan Bank Syariah, 2019

Dari data CAR diatas dari tahun 2014-2018 mengalami fluktuasi. Pada bank BRI Syariah CAR tertinggi pada tahun 2018, pada bank BNI Syariah CAR tertinggi pada tahun 2017, pada bank BCA Syariah CAR tertinggi pada tahun 2016, pada bank Syariah Mandiri CAR tertinggi pada tahun 2018, pada bank Victoria Syariah pada tahun 2018, dan pada bank syariah bukopin CAR tertinggi pada tahun 2018 serta pada bank Panin Syariah CAR tertinggi pada tahun 2014.

5.1.5. Return On asset (ROA)

Return On asset (ROA) adalah rasio yang mampu mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba pada masa lalu. Jika ROA suatu bank semakin besar, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik posisi bank tersebut dari segi pengamanan aset. Laba yang tinggi membuat bank mendapat kepercayaan dari masyarakat yang

memungkinkan bank untuk menghimpun modal yang lebih banyak sehingga bank memperoleh kesempatan menyalurkan dana dengan lebih luas.

Berikut ini data *Return On Asset* (ROA) Bank Umum Syariah Tahun 2014-2018.

Tabel 5.5
***Return On Asset* (ROA) Bank Umum Syariah Tahun 2014-2018 (jutaan rupiah)**

No.	Nama Bank	2014	2015	2016	2017	2018
1	Bank Bri Syariah	0,08	0,77	0,95	0,51	0,43
2	Bank Bni Syariah	1,27	1,43	1,44	1,31	1,42
3	Bca Syariah	0,80	1,00	1,10	1,20	1,2
4	Bank Syariah Mandiri	(0,03)	0,56	0,59	0,59	0,88
5	Bank Victoria Syariah	(1,87)	(2,36)	(2,19)	0,36	0,32
6	Bank Syariah Bukopin	0,79	0,79	-1,12	0,02	0,02
7	Bank Panin Syariah	1,99	1,14	0,30	(10,77)	0,26

Sumber : Laporan Keuangan Bank Syariah, 2018

Dari data ROA diatas dari tahun 2014-2018 mengalami fluktuasi. Pada bank BRI Syariah ROA tertinggi pada tahun 2016, pada bank BNI Syariah ROA tertinggi pada tahun 2016, pada bank BCA Syariah ROA tertinggi pada tahun 2017-2018, pada bank Syariah Mandiri ROA tertinggi pada tahun 2018, pada bank Victoria Syariah pada tahun 2017, dan pada bank syariah bukopin ROA tertinggi pada tahun 2014-2015 serta pada bank Panin Syariah ROA tertinggi pada tahun 2014.

5.1.6. *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

Dana pihak ketiga adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha, yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki bank. Dana pihak ketiga memiliki kontribusi terbesar dari beberapa sumber dana tersebut sehingga jumlah

dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh suatu bank akan mempengaruhi kemampuannya dalam menyalurkan kredit. Kredit diberikan kepada debitur yang telah memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam perjanjian yang dilakukan antara pihak debitur dengan pihak bank. Dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dapat berupa giro, tabungan dan deposito. Dana-dana pihak ketiga yang dihimpun dari masyarakat merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank (mencapai 80%-90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank). Biasanya DPK akan sangat mempengaruhi pembiayaan yang dilakukan oleh bank.

Berikut ini data *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Bank Umum Syariah Tahun 2014-2018.

Tabel 5.6
***Financing to Deposit Ratio* (FDR) Bank Umum Syariah Tahun 2014-2018**
(jutaan rupiah)

No.	Nama Bank	2014	2015	2016	2017	2018
1	Bank Bri Syariah	93,9	84,16	81,42	71,87	75,49
2	Bank Bni Syariah	92,6	91,94	84,57	80,21	79,62
3	Bca Syariah	91,2	91,4	90,1	88,5	89
4	Bank Syariah Mandiri	81,92	81,99	79,19	77,66	77,25
5	Bank Victoria Syariah	95,19	95,29	100,67	83,57	82,78
6	Bank Syariah Bukopin	92,89	90,56	88,18	82,44	93,4
7	Bank Panin Syariah	94,04	96,43	91,99	86,95	88,82

Sumber : Laporan Keuangan Bank Syariah, 2019

Dari data FDR diatas dari tahun 2014-2018 mengalami fluktuasi. Pada bank BRI Syariah FDR tertinggi pada tahun 2014, pada bank BNI Syariah FDR tertinggi pada tahun 2014, pada bank BCA Syariah FDR tertinggi pada tahun 2015, pada bank Syariah Mandiri FDR tertinggi pada tahun 2015, pada bank

Victoria Syariah pada tahun 2016, dan pada bank syariah bukopin FDR tertinggi pada tahun 2018 serta pada bank Panin Syariah FDR tertinggi pada tahun 2015.

5.1.7. Biaya Operasional dibagi Pendapatan Operasional (BOPO)

BOPO dijadikan variable independen yang mempengaruhi pembiayaan didasarkan atas logika teori dari Muljono (1995) yang menyatakan bahwa semakin kecil BOPO menunjukkan semakin efisien bank dalam menjalankan aktivitas usahanya, karena biaya operasi yang ditanggung lebih kecil dari pendapatan operasinya sehingga aktivitas operasional bank menghasilkan keuntungan, dimana hal tersebut mampu meningkatkan modal bank dan meminimumkan tingkat risikonya sehingga BOPO yang relative rendah mampu meningkatkan pembiayaan.

Berikut ini data BOPO bank umum syariah tahun 2014-2018.

Tabel 5.7
BOPO Bank Umum Syariah Tahun 2014-2018 (jutaan rupiah)

No.	Nama Bank	2014	2015	2016	2017	2018
1	Bank Bri Syariah	99,77	93,79	91,34	95,24	95,32
2	Bank Bni Syariah	89,80	89,63	86,88	87,62	85,37
3	Bca Syariah	92,90	92,50	92,20	87,20	87,4
4	Bank Syariah Mandiri	100,60	94,78	94,12	94,44	90,68
5	Bank Victoria Syariah	143,31	119,19	131,34	96,02	96,38
6	Bank Syariah Bukopin	96,77	91,99	109,62	99,2	99,45
7	Bank Panin Syariah	68,47	89,29	96,17	217,40	99,57

Sumber : Laporan Keuangan Bank Syariah, 2019

Dari data BOPO diatas dari tahun 2014-2018 mengalami fluktuasi. Pada bank BRI Syariah BOPO tertinggi pada tahun 2014, pada bank BNI Syariah BOPO tertinggi pada tahun 2014, pada bank BCA Syariah BOPO tertinggi pada tahun 2014, pada bank Syariah Mandiri BOPO tertinggi pada tahun 2014, pada

bank Victoria Syariah pada tahun 2014, dan pada bank syariah bukopin BOPO tertinggi pada tahun 2016 serta pada bank Panin Syariah BOPO tertinggi pada tahun 2017.

5.2. Hasil Analisis Statistik

Berikut ini adalah hasil pengujian statistic deskriptif untuk pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah serta rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return On Assets* (ROA), *Non Performing Financing* (NPF), Beban Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR).

Tabel 5.8
Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
NPF (X1)	35	,04	4,97	2,8183	1,61795
CAR (X2)	35	11,51	36,70	19,5243	6,21009
ROA (X3)	35	-1,12	1,99	,6400	,61217
FDR (X4)	35	71,87	100,67	87,0626	6,83164
BOPO (X5)	35	68,47	217,40	99,8786	24,19797
Pembiayaan Mudharabah (Y1)	35	4514	3360363	880892,54	1005634,777
Pembiayaan Musyarakah (Y2)	35	280055	20622671	4356318,74	4616967,635
Valid N (listwise)	35				

Sumber : Data diolah dengan SPSS 22.0, 2019

Dari hasil pengujian statistik deskriptif menunjukkan bahwa N atau jumlah data tiap sampel yang valid (sah untuk diproses adalah (35). Nilai NPF minimum adalah 0,04 dan maksimum 4,97. Nilai terkecil CAR sebesar 11,51 dan nilai maksimum sebesar 36,70. Nilai terkecil ROA sebesar -1,12 dan nilai maksimum sebesar 1,99. Nilai terkecil FDR sebesar 71,87 dan nilai maksimum sebesar

100,67. Nilai terkecil BOPO sebesar 68,47 dan nilai maksimum sebesar 217,40. Nilai terkecil Pembiayaan Mudharabah sebesar 4.514 dan nilai maksimum sebesar 3.360.363 dan nilai terkecil Pembiayaan Musyarakah sebesar 280.055 dan nilai maksimum sebesar 2.062.2671.

5.3. Analisis Data

Sebelum analisis data menggunakan regresi linier dilakukan, maka terlebih dahulu harus memenuhi asumsi-asumsi penafsiran parametrik dan koefisien regresi agar tidak bias dan mendekati kebenaran yang sesungguhnya. Sehubungan dengan itu, sebelum dilakukan pengujian terhadap analisa data dan pengujian hipotesis, maka terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap asumsi-asumsi dalam analisis regresi tersebut. Asumsi analisis regresi yang akan diuji adalah uji normalitas, autokorelasi, multikolinieritas dan heterokedastisitas.

5.3.1. Uji Normalitas Data

Sebelum melakukan pengujian hipotesis perlu dilakukan uji normalitas untuk melihat data terdistribusi normal. Uji normalitas data menggunakan *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test* dengan melihat tingkat signifikan 5% untuk mengetahui metode uji beda statistik yang digunakan pada penelitian ini. Jika data tersebut normal, maka alat uji beda yang digunakan adalah uji statistik parametrik uji *Independent Sample T-Test*. Berikut ini adalah uji normalitas yang dilakukan dengan uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*.

Tabel 5.9
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		NPF (X1)	CAR (X2)	ROA (X3)	FDR (X4)	BOPO (X5)	Pembiayaan Mudharabah (Y1)	Pembiayaan Musyarakah (Y2)
N		35	35	35	35	35	35	35
Normal Parameter s ^{a,b}	Mean	2,818 3	19,52 42	0,64	87,06 26	99,878 6	8,5345	9,3786
	Std. Deviation	1,617 95	6,210 09	0,612 17	6,831 64	24,197 97	1,32106	0,93354
Most Extreme Difference s	Absolute	0,125	0,162	0,119	0,108	0,122	0,13	0,091
	Positive	0,095	0,162	0,077	0,077	0,12	0,13	0,091
	Negative	- 0,125	-0,141	-0,119	-0,108	-0,122	-0,127	-0,087
Test Statistic		0,125	0,162	0,119	0,108	0,122	0,13	0,091
Asymp. Sig. (2-tailed)		,184 ^c	,068 ^c	,200 ^{c,d}	,200 ^{c,d}	,200 ^{c,d}	,200 ^{c,d}	,200 ^{c,d}

Sumber : Data diolah dengan SPSS 22.0, 2019

Dari data diatas dasar pengambilan keputusan dalam pengujian ini adalah jika nilai probabilitas $> 0,05$ maka variable residual terdistribusi normal. Sebaliknya jika nilai probabilitas $< 0,05$ maka variable residual tidak terdistribusi normal. Dari hasil diatas dapat dilihat bahwa semua variabel bernilai $>0,05$ berdistribusi normal. Maka model regresi ini memenuhi asumsi normalitas data. Sehingga uji statistik F dan uji statistik t dapat dilakukan untuk menguji hipotesis.

5.3.2. Uji Asumsi Klasik

Dalam penggunaan regresi terdapat beberapa asumsi dasar yang dapat menghasilkan estimator linier tidak bias yang terbaik dari model regresi yang diperoleh dari metode kuadrat terkecil biasa. Dengan terpenuhinya asumsi tersebut, maka hasil yang diperoleh dapat lebih akurat dan mendekati atau sama

dengan kenyataan. Asumsi-asumsi dasar itu dikenal sebagai asumsi klasik. Beberapa uji asumsi klasik yaitu:

1. Autokorelasi

Autokorelasi adalah kondisi dimana kesalahan pengganggu saling berkorelasi (berhubungan). Autokorelasi ini terjadi bila ada korelasi antara anggota sampel yang diurutkan berdasarkan waktu. Pengujian yang umum digunakan untuk melihat keberadaan autokorelasi adalah dengan menggunakan Durbin Watson (DW).

Berikut ini hasil perhitungan tersebut untuk pembiayaan Mudharabah (Y1) dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 5.10
Hasil Perhitungan Autokorelasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,774 ^a	,600	,531	,52587	1,200

a. Predictors: (Constant), BOPO (X5), FDR (X4), CAR (X2), ROA (X3), NPF (X1)

b. Dependent Variable: Pembiayaan Mudharabah (Y1)

Sumber : Data diolah dengan SPSS 22.0, 2019

Pada output model summary terdapat nilai Durbin-Watson 1,200. Apabila kita lihat tabel Durbin-Watson dengan $n = 35$ dan $k = 5$, maka nilai $dL = 1,2221$ dan $dU = 1,7259$, sehingga $4-dL$ sebesar 2,7779 dan $4-dU$ sebesar 2,2741. Karena nilai Durbin-Watson ($1,200$) < dari dL dan < dari dU maka hipotesis nol ditolak, yang terdapat autokorelasi. Untuk mengatasi autokorelasi maka dilanjutkan dengan runtest sebagai berikut:

Tabel 5.11
Runs Test

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	,04163
Cases < Test Value	17
Cases >= Test Value	18
Total Cases	35
Number of Runs	13
Z	-1,712
Asymp. Sig. (2-tailed)	,087

a. Median

Sumber : Data diolah dengan SPSS 22.0, 2019

Dasar pengambilan keputusan dalam uji runs test ada 2 yaitu:

1. Jika nilai Asymp. Sig (2-tailed) < 0,05 maka terdapat gejala autokorelasi
2. Jika nilai Asymp. Sig (2-tailed) > 0,05 maka tidak terdapat gejala autokorelasi.

Dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala autokorelasi untuk Y1 pembiayaan Mudharabah. Selanjutnya uji autokorelasi untuk Y2 Pembiayaan Musyarakah.

Tabel. 5.12
Hasil Perhitungan Autokorelasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,727 ^a	,528	,447	,33532	1,100

a. Predictors: (Constant), BOPO (X5), FDR (X4), CAR (X2), ROA (X3), NPF (X1)

b. Dependent Variable: Pembiayaan Musyarakah (Y2)

Sumber : Data diolah dengan SPSS 22.0, 2019

Pada output model summary terdapat nilai Durbin-Watson 1,100. Apabila kita lihat tabel Durbin-Watson dengan $n = 35$ dan $k = 5$, maka nilai $dL = 1,2221$

dan $dU = 1,7259$, sehingga $4-dL$ sebesar $2,7779$ dan $4-dU$ sebesar $2,2741$. Karena nilai Durbin-Watson $(1,100) <$ dari dL dan $<$ dari dU maka hipotesis nol ditolak, yang terdapat autokorelasi. Untuk mengatasi autokorelasi maka dilanjutkan dengan runtest sebagai berikut:

Tabel 5.13
Runs Test

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	,03519
Cases < Test Value	17
Cases \geq Test Value	18
Total Cases	35
Number of Runs	15
Z	-1,025
Asymp. Sig. (2-tailed)	,305

a. Median

Sumber : Data diolah dengan SPSS 22.0, 2019

Dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala autokorelasi untuk Y1 pembiayaan Musyarakah.

2. Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi yang digunakan memiliki hubungan antara variabel independen. Model regresi yang baik adalah tidak terdapat adanya multikolinieritas. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh multikolinieritas dapat dilihat dari nilai Variance Inflation Factor (VIF). Batasan nilai VIF untuk masing-masing nilai variabel adalah 10. Jika nilai VIF dari hasil penelitian lebih dari 10 maka variabel tersebut memiliki pengaruh multikolinieritas. Sebaliknya jika VIF dibawah angka 10 maka dianggap

bebas dari pengaruh multikolinieritas. Nilai tolerance dan VIF untuk Y1 pembiayaan mudharabah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 5.14
Hasil Perhitungan Multikolinieritas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	NPF (X1)	,273	3,659
	CAR (X2)	,662	1,512
	ROA (X3)	,363	2,752
	FDR (X4)	,790	1,265
	BOPO (X5)	,637	1,570

a. Dependent Variable: Pembiayaan Mudharabah (Y1)

Sumber : Data diolah dengan SPSS 22.0, 2019

Berdasarkan tabel 5.14 dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan tidak terdapat adanya pengaruh multikolinieritas. Nilai VIF variabel independen berdasarkan tabel 5.14 dibawah angka 10 dan mempunyai tolerance mendekati angka 1.

Selanjutnya uji multikolinieritas untuk Y2 Pembiayaan Musyarakah sebagai berikut:

Tabel. 5.15
Hasil Perhitungan Multikolinieritas
Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	NPF (X1)	,273	3,659
	CAR (X2)	,662	1,512
	ROA (X3)	,363	2,752
	FDR (X4)	,790	1,265
	BOPO (X5)	,637	1,570

a. Dependent Variable: Pembiayaan Musyarakah (Y2)

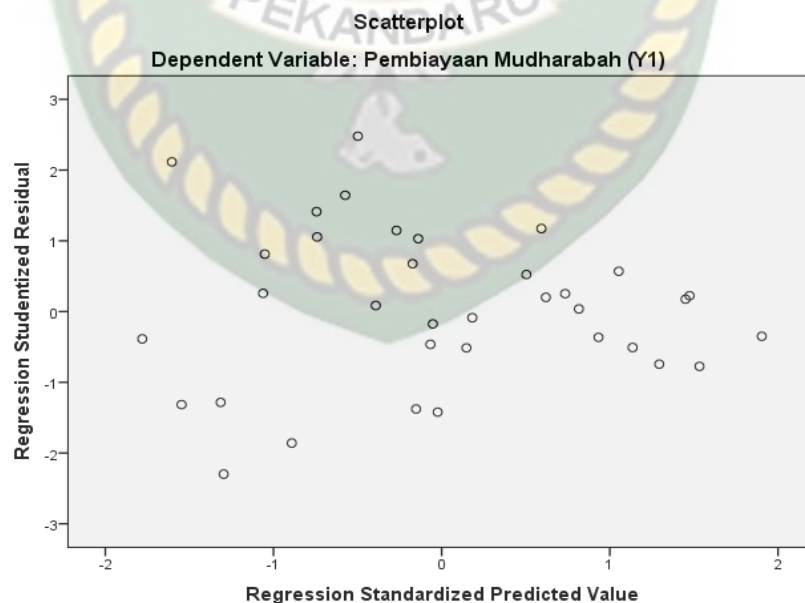
Sumber : Data diolah SPSS 22.0, 2019

Berdasarkan tabel 5.15 dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan tidak terdapat adanya pengaruh multikolinieritas. Nilai VIF variabel independen berdasarkan tabel 5.15 dibawah angka 10 dan mempunyai tolerance mendekati angka 1.

3. Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas dilakukan pada model yang telah bebas asumsi autokorelasi dan multikolinieritas. Pengujian heterokedastisitas adalah dengan mengamati grafik scatter plot. Jika membentuk pola tertentu, maka terdapat heterokedastisitas. Jika titik-titiknya tidak membentuk suatu pola yang jelas dan menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terdapat pengaruh heterokedastisitas.

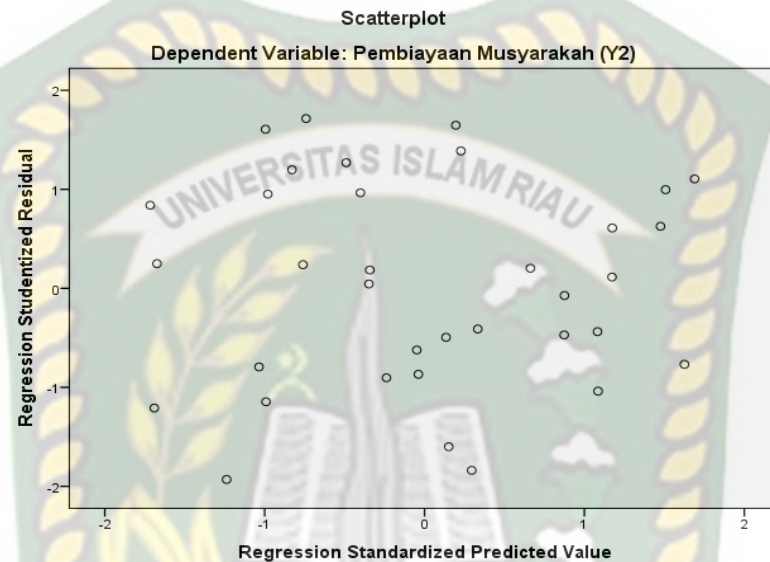
Gambar 5.1
Hasil Uji Heterokedastisitas Terhadap Pembiayaan Mudharabah (Y1)



Dari gambar 5.1 dapat dilihat bahwa titik-titik pada gambar tidak membentuk suatu pola tertentu dan menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada

sumbu Y. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa pada penelitian ini tidak terdapat adanya gejala heterokedastisitas.

Gambar 5.2
Hasil Uji Heterokedastisitas Terhadap Pembiayaan Musyarakah (Y2)



Dari gambar 5.2 dapat dilihat bahwa titik-titik pada gambar tidak membentuk suatu pola tertentu dan menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa pada penelitian ini tidak terdapat adanya gejala heterokedastisitas.

5.4. Pengaruh NPF, CAR, ROA, FDR dan BOPO Terhadap Pembiayaan Mudharabah (Y1)

Dalam penelitian ini model regresi yang digunakan adalah model regresi berganda, yaitu dengan menggunakan variabel-variabel NPF, CAR, ROA, FDR dan BOPO terhadap Pembiayaan Mudharabah (Y1) . Hasil analisis regresi berganda dapat dilihat pada tabel 5.16 berikut ini.

Tabel. 5.16
Pengaruh NPF, CAR, ROA, FDR dan BOPO Terhadap Pembiayaan
Mudharabah (Y1)
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	13,020	1,597		8,153	,000
	NPF	-,158	,107	-,333	-1,481	,149
	CAR	-,076	,018	-,618	-4,277	,000
	ROA	,214	,244	,171	,877	,387
	FDR	-,061	,015	-,541	-4,091	,000
	BOPO	-,004	,005	-,123	-,838	,409

a. Dependent Variable: Pembiayaan Mudharabah (Y1)

Sumber : Data diolah dengan SPSS 22.0, 2019

Sesuai dengan hasil analisis regresi pada tabel 5.9 maka persamaan regresi yang dihasilkan adalah: $Y = 13,020 - 0,333X_1 - 0,618X_2 + 0,171X_3 - 0,541X_4 - 0,123X_5$. Maka dengan kata lain persamaan regresi diatas dapat didefinisikan sebagai berikut:

$\beta_0 = 13,020$, dapat diartikan sebagai besarnya pembiayaan mudharabah bila NPF, CAR, ROA, FDR dan BOPO adalah 0.

$\beta_1 = -0,333$ maka dapat diinterpretasikan bahwa NPF jika naik 1 satuan, maka pembiayaan akan turun sebesar $-0,333$ satuan dengan asumsi variable lain tetap.

$\beta_2 = -0,618$, maka dapat diinterpretasikan bahwa jika CAR naik sebesar 1 satuan, maka pembiayaan akan turun sebesar $-0,618$ satuan dengan asumsi variable lain tetap.

$\beta_3 = 0,171$ maka dapat diinterpretasikan bahwa jika ROA naik sebesar 1 satuan, maka pembiayaan akan naik sebesar 0,171 satuan dengan asumsi variable lain tetap.

$\beta_4 = -0,541$, maka dapat diinterpretasikan bahwa jika FDR naik sebesar 1 satuan, maka pembiayaan akan turun sebesar $-0,541$ satuan dengan asumsi variable lain tetap.

$\beta_5 = -0,123$, maka dapat diinterpretasikan bahwa jika BOPO naik sebesar 1 satuan, maka pembiayaan akan turun sebesar $-0,123$ satuan dengan asumsi variable lain tetap.

5.5. Pengaruh NPF, CAR, ROA, FDR dan BOPO Terhadap Pembiayaan Musyarakah (Y2)

Berikut ini analisis regresi berganda dengan menggunakan variabel-variabel NPF, CAR, ROA, FDR dan BOPO terhadap variabel pembiayaan Musyarakah (Y2). Hasil analisis regresi berganda dapat dilihat pada tabel 5.17 berikut ini.

Tabel. 5.17
Pengaruh NPF, CAR, ROA, FDR dan BOPO Terhadap Pembiayaan Musyarakah (Y2)

Model		Unstandardized Coefficients			Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	10,618	1,018		10,428	,000	
	NPF	-,022	,068	-,080	-,328	,745	
	CAR	-,032	,011	-,439	-2,797	,009	
	ROA	,091	,156	,123	,583	,564	
	FDR	-,040	,009	-,606	-4,222	,000	
	BOPO	-,001	,003	-,042	-,265	,793	

a. Dependent Variable: Pembiayaan Musyarakah (Y2)

Sumber : Data diolah dengan SPSS 22.0, 2019

Sesuai dengan hasil analisis regresi pada tabel 5.9 maka persamaan regresi yang dihasilkan adalah: $Y = 10,618 - 0,080X_1 - 0,439X_2 + 0,123X_3 - 0,606X_4 - 0,042X_5$. Maka dengan kata lain persamaan regresi diatas dapat didefinisikan sebagai berikut:

$\beta_0 = 10,618$, dapat diartikan sebagai besarnya pembiayaan mudharabah bila NPF, CAR, ROA, FDR dan BOPO adalah 0.

$\beta_1 = -0,080$ maka dapat diinterpretasikan bahwa NPF jika naik 1 satuan, maka pembiayaan akan turun sebesar $-0,080$ satuan dengan asumsi variable lain tetap.

$\beta_2 = -0,439$, maka dapat diinterpretasikan bahwa jika CAR naik sebesar 1 satuan, maka pembiayaan akan turun sebesar $-0,439$ satuan dengan asumsi variable lain tetap.

$\beta_3 = 0,123$ maka dapat diinterpretasikan bahwa jika ROA naik sebesar 1 satuan, maka pembiayaan akan naik sebesar $0,123$ satuan dengan asumsi variable lain tetap.

$\beta_4 = -0,606$ maka dapat diinterpretasikan bahwa jika FDR naik sebesar 1 satuan, maka pembiayaan akan turun sebesar $0,66$ satuan dengan asumsi variable lain tetap.

$\beta_5 = -0,042$ maka dapat diinterpretasikan bahwa jika BOPO naik sebesar 1 satuan, maka pembiayaan akan turun sebesar $-0,042$ satuan dengan asumsi variable lain tetap.

5.6. Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi berguna untuk mengukur seberapa besar variasi dalam variabel independen mampu menjelaskan bersama-sama variabel dependen.

Tabel. 5.18
Hasil Perhitungan Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,774 ^a	,600	,531	,52587	1,200

a. Predictors: (Constant), BOPO (X5), FDR (X4), CAR (X2), ROA (X3), NPF (X1)

b. Dependent Variable: Pembiayaan Mudharabah (Y1)

Sumber : Data diolah dengan SPSS 22.0, 2019

Berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi terhadap Pembiayaan Mudharabah (Y1) diketahui bahwa R^2 pada penelitian ini adalah sebesar 0,600 (60%). Dengan demikian besarnya pengaruh variabel NPF, CAR, ROA, FDR dan BOPO terhadap pembiayaan mudharabah adalah sebesar 60 % dan 40% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan oleh peneliti. Untuk mengetahui variabel independen yang pengaruhnya saling dominan terhadap pembiayaan dapat dilihat dari koefisien persamaan regresi masing-masing variabel atau dari tingkat signifikannya.

Tabel. 5.19
Hasil Perhitungan Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,727 ^a	,528	,447	,33532	1,100

a. Predictors: (Constant), BOPO (X5), FDR (X4), CAR (X2), ROA (X3), NPF (X1)

b. Dependent Variable: Pembiayaan Musyarakah (Y2)

Sumber : Data diolah dengan SPSS 22.0, 2019

Berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi diketahui bahwa R^2 pada penelitian ini adalah sebesar 0,528 (52,8%). Dengan demikian besarnya pengaruh variabel NPF, CAR, ROA, FDR dan BOPO terhadap pembiayaan adalah sebesar 52,8 % dan 47,2% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan oleh peneliti. Untuk mengetahui variabel independen yang pengaruhnya saling dominan terhadap pembiayaan dapat dilihat dari koefisien persamaan regresi masing-masing variabel atau dari tingkat signifikannya.

5.7. Pengujian Hipotesis

Untuk menguji hipotesis maka dilakukan dua pengujian yaitu uji parsial (t) dan uji simultan (F). Uji parsial (t) dilakukan untuk menguji hipotesis pertama dan kedua, yaitu untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Sedangkan uji simultan (F) dilakukan untuk menguji hipotesis ketiga, yaitu untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama. Pengujian dan pembahasan masing-masing hipotesis dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengujian secara parsial (t)

Pengujian variabel secara parsial (individual) dilakukan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab hipotesis yang pertama dan kedua. Dengan tingkat keyakinan 95% dan dengan pengujian

dua arah serta tingkat signifikan sebesar 5% maka dinyatakan ketentuan menolak H_0 adalah dengan cara melihat t signifikan dimana jika t signifikan $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Adapun hasil perhitungan uji t maka dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel. 5.20
Hasil Analisis Uji t
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	13,020	1,597		8,153	,000
	NPF (X1)	-,158	,107	-,333	-1,481	,149
	CAR (X2)	-,076	,018	-,618	-4,277	,000
	ROA (X3)	,214	,244	,171	,877	,387
	FDR (X4)	-,061	,015	-,541	-4,091	,000
	BOPO (X5)	-,004	,005	-,123	-,838	,409

a. Dependent Variable: Pembiayaan Mudharabah (Y1)

Sumber : Data diolah dengan SPSS 22.0, 2019

Pengaruh NPF terhadap variabel pembiayaan muharabah dengan melihat t signifikan harga sebesar 0,149 dan besar dari 0,05 maka H_0 ditolak, berarti NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel pembiayaan mudharabah.

Pengaruh CAR terhadap variabel pembiayaan dengan melihat t signifikan harga sebesar 0,000 dan lebih kecil dari 0,05 maka H_0 diterima, berarti CAR berpengaruh signifikan terhadap variabel pembiayaan mudharabah.

Pengaruh ROA terhadap variabel pembiayaan dengan melihat t signifikan harga sebesar 0,387 dan besar dari 0,05 maka H_0 ditolak, berarti ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel pembiayaan mudharabah.

Pengaruh FDR terhadap variabel pembiayaan dengan melihat t signifikan harga sebesar 0,000 dan kecil dari 0,05 maka H0 diterima, berarti FDR berpengaruh signifikan terhadap variabel pembiayaan mudharabah.

Pengaruh BOPO terhadap variabel pembiayaan dengan melihat t signifikan harga sebesar 0,409 dan besar dari 0,05 maka H0 ditolak, berarti BOPO tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel pembiayaan mudharabah.

Berdasarkan hasil uji t yang dilakukan dari keempat variable maka dapat disimpulkan dari kelima variable yang berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah yaitu CAR dan FDR sedangkan NPF, ROA dan BOPO tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah.

Tabel. 5.21
Hasil Analisis Uji t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	10,618	1,018		10,428	,000
NPF (X1)	-,022	,068	-,080	-,328	,745
CAR (X2)	-,032	,011	-,439	-2,797	,009
ROA (X3)	,091	,156	,123	,583	,564
FDR (X4)	-,040	,009	-,606	-4,222	,000
BOPO (X5)	-,001	,003	-,042	-,265	,793

a. Dependent Variable: Pembiayaan Musyarakah (Y2)

Sumber : Data diolah dengan SPSS 22.0, 2019

Pengaruh NPF terhadap variabel pembiayaan musyarakah dengan melihat t signifikan harga sebesar 0,745 dan besar dari 0,05 maka H0 ditolak, berarti NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel pembiayaan musyarakah.

Pengaruh CAR terhadap variabel pembiayaan dengan melihat t signifikan harga sebesar 0,009 dan lebih kecil dari 0,05 maka H_0 diterima, berarti CAR berpengaruh signifikan terhadap variabel pembiayaan musyarakah.

Pengaruh ROA terhadap variabel pembiayaan dengan melihat t signifikan harga sebesar 0,564 dan besar dari 0,05 maka H_0 ditolak, berarti ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel pembiayaan musyarakah.

Pengaruh FDR terhadap variabel pembiayaan dengan melihat t signifikan harga sebesar 0,000 dan kecil dari 0,05 maka H_0 diterima, berarti FDR berpengaruh signifikan terhadap variabel pembiayaan musyarakah.

Pengaruh BOPO terhadap variabel pembiayaan dengan melihat t signifikan harga sebesar 0,793 dan besar dari 0,05 maka H_0 ditolak, berarti BOPO tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel pembiayaan musyarakah.

Berdasarkan hasil uji t yang dilakukan dari keempat variable maka dapat disimpulkan dari kelima variable yang berpengaruh terhadap pembiayaan musyarakah yaitu CAR dan FDR sedangkan NPF, ROA dan BOPO tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan musyarakah.

2. Pengujian secara simultan (F)

Untuk mengetahui apakah variabel NPF, CAR, ROA, FDR dan BOPO secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel pembiayaan dapat diketahui dengan melakukan uji F atau dengan uji ANOVA. Uji F dilakukan dengan membandingkan nilai F_{hitung} dengan nilai F_{tabel} , dengan tingkat keyakinan 95% atau dengan taraf nyata (α) adalah 5%. Adapun hasil statistic uji F yaitu :

Tabel. 5.22
Hasil Analisis Uji F
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	12,017	5	2,403	8,691	,000 ^b
	Residual	8,020	29	,277		
	Total	20,036	34			

a. Dependent Variable: Pembiayaan Mudharabah (Y1)

b. Predictors: (Constant), BOPO (X5), FDR (X4), CAR (X2), ROA (X3), NPF (X1)

Sumber : Data diolah dengan SPSS 22.0, 2019

Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, sebaliknya jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Pada uji ANOVA yang telah dilakukan diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 8,691 dengan nilai F_{tabel} sebesar 2,53 ($8,691 > 2,53$). Sehingga diputuskan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya, secara bersama-sama variabel NPF, CAR, ROA, FDR dan BOPO memiliki pengaruh terhadap variabel pembiayaan mudharabah. Keputusan ini didukung oleh P-value yang berada dibawah 0,05 yaitu sebesar 0,000 dimana secara statistik nilai ini sangat signifikan.

Tabel. 5.23
Hasil Analisis Uji F
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3,648	5	,730	6,488	,000 ^b
	Residual	3,261	29	,112		
	Total	6,908	34			

a. Dependent Variable: Pembiayaan Musyarakah (Y2)

b. Predictors: (Constant), BOPO (X5), FDR (X4), CAR (X2), ROA (X3), NPF (X1)

Sumber : Data diolah dengan SPSS 22.0, 2019

Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, sebaliknya jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Pada uji ANOVA yang telah dilakukan diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 6,488 dengan nilai F_{tabel} sebesar 2,53 ($6,488 > 2,53$). Sehingga diputuskan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya, secara bersama-sama variabel NPF, CAR, ROA, FDR dan BOPO memiliki pengaruh terhadap variabel pembiayaan musyarakah. Keputusan ini didukung oleh P-value yang berada dibawah 0,05 yaitu sebesar 0,000 dimana secara statistik nilai ini sangat signifikan.

5.8.Pembahasan

5.8.1.Pengaruh NPF Terhadap Pembiayaan Mudharabah

NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah. Semakin tinggi NPF akan mendorong penurunan jumlah kredit yang disalurkan, demikian pula sebaliknya. Hal ini berbeda dengan teori yang mengatakan bahwa semakin tinggi NPF maka akan memberikan pengaruh yang negative terhadap pembiayaan, yaitu berupa penurunan jumlah pembiayaan yang disalurkan. Penyebab adalah tidak konsistennya antara kenaikan atau penurunan NPF terhadap jumlah pembiayaan mudharabah di setiap tahunnya.

Hasil studi ini memperkuat hasil studi sebelumnya yang dilakukan oleh Andraeny (2011) dan Kurniawanti & Zulfikar (2014) Giannini (2013) dan Widiastuty (2017) menyebutkan bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. Artinya perubahan NPF menimbulkan perubahan yang relative kecil terhadap penyaluran pembiayaan mudharabah pada BUS di Indonesia. Hasil penelitian ini sesuai

dengan teori yang menyatakan bahwa semakin tinggi nilai NPF maka akan menyebabkan nilai pembiayaan menjadi turun. Semakin tinggi NPF menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pembiayaan bermasalah yang ada di bank syariah atau dapat juga dikatakan semakin rendah kemampuan bank dalam berupaya mengembalikan pembiayaan yang telah diberikan kepada nasabah. Hal tersebut menunjukkan bahwa bank kurang mampu mengelola dan mengendalikan penyaluran pembiayaan yang diberikan sehingga banyak nasabah tidak tepat waktu atau menunda-nunda dalam mengembalikan pembiayaan yang telah diberikan, karena hal tersebut maka mengakibatkan rasio pembiayaan bermasalah NPF menjadi tinggi. Untuk itu pihak bank membuat suatu kebijakan dengan memperketat pemberian pembiayaan kepada nasabah. Dengan semakin ketatnya pemberian pembiayaan maka berpengaruh pada rendahnya pembiayaan bagi hasil. Christie (2007) menjelaskan bahwa jika terjadi peningkatan jumlah pembiayaan bermasalah *Non Performing Financing* maka akan menurunkan jumlah pembiayaan mudharabah.

5.8.2. Pengaruh CAR Terhadap Pembiayaan Mudharabah

CAR berpengaruh negative dan signifikan terhadap pembiayaan mudharabah. Penelitian ini memiliki kesesuaian hasil dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Purnomo dan Santoso (2015) yang menyatakan bahwa CAR (*capital adequacy ratio*) berpengaruh negatif terhadap pembiayaan syariah. CAR merupakan rasio kewajiban pemenuhan modal minimum yang harus dimiliki oleh bank. Hubungan negatif ini artinya semakin tinggi perolehan CAR, maka akan menurunkan pembiayaan. Hal ini berarti

perolehan CAR yang tinggi pada bank, hanya sedikit saja yang disalurkan ke pembiayaan. Sehingga menyebabkan pembiayaan mengalami penurunan. CAR merupakan rasio kewajiban pemebuhan modal minimum yang harus dimiliki oleh bank, yang mana modal bank tersebut dapat digunakan untuk mengantisipasi dari kemungkinan terjadinya risiko-risiko. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan dengan Yuda dan Meiranto (2010) bahwa CAR berpengaruh negative pada pembiayaan. Kondisi ini menyiratkan bahwa semakin tinggi pembiayaan yang diberikan oleh bank maka semakin berkurang modal yang dimiliki oleh bank, ini dikarenakan pembiayaan yang diberikan oleh bank ada yang bermasalah dan menyebabkan pengurangan modal bank.

5.8.3. Pengaruh ROA terhadap Pembiayaan Mudharabah

ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah. Hasil penelitian ini sesuai dengan Hasil penelitian serupa dengan yang dilakukan oleh Giannini (2013) dan Bakti (2013) yang menunjukkan bahwa ROA berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah pada bank umum syariah. Menurut Simorangkir (2004) dalam Triasdini (2010) tingkat profitabilitas yang tinggi tercermin dalam nilai ROA membuat bank mendapat kepercayaan dari masyarakat yang memungkinkan bank untuk menghimpun modal lebih banyak sehingga bank memperoleh kesempatan untuk melakukan ekspansi pembiayaan yang lebih luas. Artinya jika ROA mengalami peningkatan maka penyaluran pembiayaan pun akan mengalami peningkatan. Salah satu cara untuk memperoleh keuntungan tersebut melalui pendapatan dari penyaluran pembiayaan. Jika pendapatan pembiayaan semakin banyak maka *profit* bank akan bertambah, dan

akan mempengaruhi peningkatan penyaluran pembiayaan berikutnya (Suwarsi,2008). Tingkat perolehan profit atau keuntungan yang diperoleh oleh juga mampu memberikan motivasi tersendiri bagi pihak bank untuk meningkatkan keuntungan atau *profit* dengan cara melakukan spesialisasi sektor pembiayaan yang mampu menghasilkan keuntungan maksimal dengan tingkat risiko terendah (Satria dan Subegti, 2007:420).

5.8.4. Pengaruh FDR terhadap Pembiayaan Mudharabah

FDR berpengaruh negative dan signifikan terhadap pembiayaan mudharabah. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Nafilah (2017) Rimadhani dan Erza (2011) bahwa FDR berpegaruh negative dan signifikan terhadap pembiayaan mudharabah. Dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank lebih banyak dibandingkan dengan jumlah pembiayaan mudharabah yang disalurkan, jadi pendapatan bank dari bagi hasilnya lebih kecil dibanding pemberian jasa atas penyimpanan dana nasabah. Dalam perbankan syariah, FDR bukan saja mencerminkan keseimbangan tetapi juga keadilan karena bank benar-benar membagikan hasil riil dari dunia usaha (*financing*) kepada penabung (deposit) (Antonio, 2001:145). Penelitian ini mendukung penelitian Giannini (2013) yang menyatakan bahwa FDR berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan mudharabah. Pengaruh negatif berarti bahwa semakin tinggi *Financing to Deposit Ratio* (FDR) maka semakin rendah penyaluran pembiayaan *mudharabah* berbasis bagi hasil dan sebaliknya semakin rendah rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) maka semakin tinggi penyaluran pembiayaan *mudharabah* berbasis bagi hasil. Hal ini dikarenakan dana yang berhasil

dikumpulkan dari masyarakat tidak sepenuhnya digunakan untuk penyaluran pembiayaan (termasuk pembiayaan *mudharabah* berbasis bagi hasil), tetapi dana tersebut juga digunakan untuk menjaga kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan, berarti digambarkan sebagai bank yang kurang likuid jika dana tersebut sepenuhnya disalurkan kepada masyarakat (Muhammad, 2009:30).

5.8.5. Pengaruh BOPO Terhadap Pembiayaan Mudharabah

BOPO tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah. Penelitian ini sesuai dengan penelitian Juliana dan Mulazid (2017) dan Nugraha (2014). Juliana dan Mulazid (2017) menjelaskan bahwa hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan semakin besar rasio BOPO, maka semakin tidak efisien suatu bank. Efisiensi bank dikatakan membaik ditunjukkan oleh penurunan nilai BOPO. Semakin kecil rasio BOPO berarti semakin efisien beban operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan, sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil pada penyaluran pembiayaan mudharabah. Hal ini sesuai dari teori Katmas (2014) yang menyatakan bahwa jika semakin rendah BOPO berarti semakin efisien bank tersebut dalam mengendalikan biaya operasionalnya, dengan adanya efisien biaya maka keuntungan yang diperoleh bank akan lebih besar. dalam pengertian sederhana jika BOPO menurun maka pendapatan bagi hasil yang asalnya dari pendistribusian pembiayaan mampu menutup bagi hasil yang diberikan kepada deposan. Begitu juga sebaliknya, Tingginya rasio BOPO menandakan kemungkinan bank dalam kondisi bermasalah, biaya operasional yang tinggi ini menandakan tidak efisiennya

perbankan tersebut. Dikarenakan tidak efisien maka pembiayaan juga mengalami penurunan.

5.8.6. Pengaruh NPF Terhadap Pembiayaan Musyarakah

NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan musyarakah. *Non Performing Financing* (NPF) adalah resiko tidak terbayarnya pembiayaan yang disalurkan oleh Bank umum syariah. Hal ini berbeda dengan teori yang mengatakan bahwa semakin tinggi NPF maka akan memberikan pengaruh yang negative terhadap pembiayaan, yaitu berupa penurunan jumlah pembiayaan yang disalurkan. Penyebab adalah tidak konsistennya antara kenaikan atau penurunan NPF terhadap jumlah pembiayaan mudharabah di setiap tahunnya.

Jika NPF mengalami peningkatan maka pembiayaan *murabahah* yang disalurkan mengalami penurunan, begitu juga sebaliknya jika NPF mengalami penurunan maka pembiayaan *murabahah* yang disalurkan mengalami peningkatan (Wardiantika dan Kusumaningtias, 2014). Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Permatasari dan Yulianto (2018). Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Nurjaya (2011:61), “Semakin tinggi rasio NPF maka semakin rendah pembiayaan musyarakah”. Sebaliknya, Semakin kecil rasio NPF akan semakin baik pembiayaan musyarakah karena minimnya kredit atau pembiayaan yang gagal bayar. Dimana gagal bayar pada suatu bank merupakan sinyal negatif bagi bank yang bersangkutan. *Non Performing Financing* (NPF) mencerminkan tingkat resiko kredit bank. Semakin tinggi tingkat NPF, maka semakin tinggi tingkat resiko kredit yang dimiliki oleh bank.

Oleh sebab itu, tingginya tingkat NPF menjadi salah satu penyebab sulitnya bank dalam menjalankan kegiatan penyaluran pembiayaan (Sentausa, 2009).

5.8.7. Pengaruh CAR Terhadap Pembiayaan Musyarakah

CAR berpengaruh negative dan signifikan terhadap pembiayaan musyarakah. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Sela Fauziah dan Amelia (2017) dan Haqqi (2016) yang menyatakan CAR pengaruh negative yang signifikan terhadap pembiayaan. CAR adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko, misalnya kredit yang diberikan. CAR merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktiva sebagai akibat dari kerugian-kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva yang berisiko dengan kecukupan modal yang dimilikinya (Dendawijaya, 2005). Artinya naik turunnya Pembiayaan dipengaruhi oleh naik turunnya rasio CAR. Hasil Penelitian ini konsisten dengan penelitian Dewiyani (2014) dan Nurlestari (2015). Adanya pengaruh negatif CAR terhadap Pembiayaan dikarenakan CAR yang tinggi menandakan adanya sumber daya finansial atau modal yang menganggur (*idle*), sehingga bank akan mengurangi pembiayaan karena kenaikan pembiayaan yang disalurkan akan menambah aset berisiko. Adanya penambahan aset berisiko ini mengharuskan bank menambah modalnya untuk memenuhi ketentuan CAR.

5.8.8. Pengaruh ROA terhadap Pembiayaan Musyarakah

ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan musyarakah. Penelitian ini sejalan dengan Permatasari dan Yulianto (2018) dan bahwa nilai ROA tidak berpengaruh terhadap pembiayaan. *Return on Asset* adalah rasio yang mengukur kemampuan asset bank dalam memperoleh keuntungan (Veithzal, 2012: 481). Semakin besar *Return On Asset* (ROA), semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai dari semakin baiknya posisi bank dalam penggunaan asset. Secara sederhana ROA adalah perbandingan antara laba sebelum pajak dengan rata-rata total asset bank. Peningkatan *Return on Asset* (ROA) dapat meningkatkan pembiayaan perbankan. Jika *Return on Asset* (ROA) yang dihasilkan tinggi maka bank telah menggunakan aktivitya secara optimal untuk memperoleh pendapatan. Apabila *Return On Asset* (ROA) meningkat, berarti profitabilitas perusahaan meningkat, sehingga dampak akhirnya adalah peningkatan profitabilitas yang dinikmati oleh pemegang saham (Husnan, 1998). Menurut Simorangkir (2004) dalam Triasdini (2010) tingkat profitabilitas yang tinggi tercermin dalam nilai ROA membuat bank mendapat kepercayaan dari masyarakat yang memungkinkan bank untuk menghimpun modal lebih banyak sehingga bank memperoleh kesempatan untuk melakukan ekspansi pembiayaan yang lebih luas. Artinya jika ROA mengalami peningkatan maka penyaluran pembiayaan pun akan mengalami peningkatan.

5.8.9. Pengaruh FDR terhadap Pembiayaan Musyarakah

FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan musyarakah. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Nafilah (2017) dan Rimadhani dan Erza

(2011) bahwa FDR berpengaruh negative dan signifikan terhadap pembiayaan musyarakah. Besarnya pembiayaan yang disalurkan bank syariah tidak bergantung kepada besarnya dana pihak ketiga, tetapi juga bergantung pada investasi terikat, atau tidak terikat dan juga bergantung pada modal (Lestari, 2013:108). Dalam perbankan syariah, FDR bukan saja mencerminkan keseimbangan tetapi juga keadilan karena bank benar-benar membagikan hasil riil dari dunia usaha (*financing*) kepada penabung (*deposit*) (Antonio, 2001:145). Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Safitri (2016) yang menyatakan bahwa FDR berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan. *Financing to Deposit Ratio* dapat digunakan untuk menilai seberapa jauh kemampuan bank yang mengandalkan pembiayaan sebagai sumber utama likuiditasnya dalam membayar kewajiban jangka pendeknya, seperti penarikan dana yang dilakukan oleh deposan dan juga bagi hasil yang harus diberikan kepada para nasabahnya. Kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan akan semakin rendah jika FDR semakin tinggi dikarenakan jumlah dana yang digunakan untuk penyaluran pembiayaan semakin besar. Sebaliknya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan akan semakin tinggi jika FDR bank tersebut semakin rendah. (Forestina, 2014:45).

5.8.10. Pengaruh BOPO Terhadap Pembiayaan Musyarakah

BOPO tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan musyarakah. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Adzimatunur (2015) dan Nugraha (2014) yang menyatakan BOPO tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan. BOPO termasuk rasio rentabilitas (*earnings*). Keberhasilan bank didasarkan pada penilaian kuantitatif terhadap rentabilitas bank

dapat diukur dengan menggunakan rasio Biaya Operasional dibagi Pendapatan Operasional. Rasio biaya operasional digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Rasio Biaya Operasional dibagi Pendapatan Operasional (BOPO) sering disebut rasio efisiensi digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan Biaya Operasional dibagi Pendapatan Operasional. Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan. Jika semakin tinggi BOPO maka akan semakin menurun kinerja keuangan perbankan, sebaliknya jika semakin rendah BOPO maka kinerja keuangan perbankan semakin meningkat. Meskipun hasilnya tidak signifikan bukan berarti bank dapat mengabaikannya, karena BOPO merupakan rasio yang terikat dengan penyaluran pembiayaan. Apabila semakin rendah tingkat rasio BOPO berarti semakin baik kinerja manajemen pembiayaan bank tersebut, karena lebih efisien dalam menggunakan sumber daya yang ada di perusahaan (Riyadi, 2006:159).

Berdasarkan hasil penelitian ini secara keseluruhan penelitian yang mempengaruhi pembiayaan pada bank Syariah adalah sama, baik pembiayaan mudharabah maupun pembiayaan musyarakah. Hal ini terlihat dari hasil uji statistik yang menunjukkan bahwa faktor yang berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah maupun pembiayaan musyarakah adalah CAR (*Capital Adequacy Ratio*) dan FDR (*Financing to Deposit Ratio*).

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Setelah diadakan analisis data yang telah dikemukakan dalam data sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban permasalahan dan sekaligus dalam mencapai tujuan penelitian ini.

1. Secara simultan variabel NPF, CAR, ROA, FDR dan BOPO berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah. Secara parsial variabel NPF, ROA dan BOPO tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah dan variabel CAR dan FDR berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah dan musyarakah.
2. Hasil penelitian ini secara keseluruhan penelitian yang mempengaruhi pembiayaan pada bank Syariah adalah sama, baik pembiayaan mudharabah maupun pembiayaan musyarakah. Hal ini terlihat dari hasil uji statistik yang menunjukkan bahwa faktor yang berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah maupun pembiayaan musyarakah adalah CAR (*Capital Adequacy Ratio*) dan FDR (*Financing to Deposit Ratio*).

6.2. Saran

Dengan hasil yang telah disimpulkan, penulis memberikan beberapa saran demi perbaikan-perbaikan terhadap para peneliti selanjutnya yaitu :

1. Informasi yang diperoleh dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen serta pihak-pihak yang berkepentingan dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Saran berikutnya bagi perusahaan yaitu untuk lebih berhati-hati mengambil keputusan yang berkaitan dengan hutang dan kepemilikan saham oleh manajer, dikarenakan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hutang dan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan.
2. Untuk para investor dan manajer disarankan untuk menjadikan laporan keuangan perusahaan sebagai salah satu referensi mengambil keputusan sehingga dapat mengetahui keuntungan yang akan diperoleh dalam investasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2007. *Manajemen Keuangan Bisnis*. Yogyakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Adiwarman Azwar Karim, 2004. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta:PT. Raja. Grafindo Persada.
- Adzimatinur, Fauziyah. Hartono, Sri dan Wiliasih, Ranti .2014.Faktor-faktor yang Mempengaruhi Besaran Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia.Jurnal Al Muzara'ah. ISSN 2337-6333.
- Agus Sartono. 2001. *Manajemen Keuangan "Teori dan Aplikasi"*. Yogyakarta : Penerbit BPFE-Yogyakarta.
- Ali, AM Hasan dkk, 2008. *Materi Dakwah Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Pusat. Komunikasi Syari'ah.
- Amelia, Erika dan Hardini Eva Fauziah. 2017. Determinant Of Mudharaba Financing: A Study At Indonesian Islamic Rural Banking. Etikonomi Volume 16 (1), April 2017 P-ISSN: 1412-8969; E-ISSN: 2461-0771 Page 43 - 52
- Andraeny , D. 2011. Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil, dan Non Performing Financing terhadap Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi XIV Aceh Universitas Syiah Kuala Banda Aceh*.
- Antonio, muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani Press.Jakarta.
- Atmaja, Lukas Setia. 2002. *Manajemen Keuangan Edisi Revisi* Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Bambang Sugeng. 2009. *Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Struktur Modal terhadap Kebijakan Inisiasi Dividen di indonesia*, *Jurnal Ekonomi Bisnis*, Tahun 14. No.1.
- Brigham, E F, dan Houston, J F,. 2006. *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*. Buku Kedua. Edisi Kesepuluh. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Brigham, E F,. 2005. *Manajemen Keuangan*. Edisi Kedelapan. Buku Pertama. Jakarta : Penerbit Erlangga.

- Christie, Anita. 2007. "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Jumlah Pembiayaan Mudharabah di Bank Muamalat Indonesia (Periode Maret 2001 s.d. Februari 2006)". Tesis. Jakarta: UI.
- Dahlan Siamat. 2000. *Manajemen Perbankan*. Jakarta; Fakultas Ekonomi. Universitas Indonesia.
- Dewi Astuti. 2004. *Manajemen Keuangan Perusahaan*. Jakarta : Penerbit Ghalia Indonesia.
- Dendawijaya, L. 2005. *Manajemen Perbankan*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Forestiana, Eka. Mei. 2014. *Pengaruh kinerja keuangan perbankan terhadap pembiayaan mudharabah pada bank umum syariah di indonesia periode 2010-2012*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Ibrahim Malang.
- Giannini, N. Gilang. 2013. *Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia*. Accounting Analysis Journal.
- Harahap, Sofyan S. 2005. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta : Lpfe Usakti.
- Hartijo Agus, Martono D. 2004 *Manajemen Keuangan Edisi Pertama* Penerbit Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta.
- Hatta, A J. 2002. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Dividen : Investigasi Pengaruh Teori Stakeholder. *JAAI* Volume 6 No 2, Desember 2002.
- Husnan, S., dan Pudjiastuti, E. 2004. *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*. Edisi Keempat. Yogyakarta : Penerbit Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN.
- Haqqi, Hibatul. 2016. Analisis Pengaruh Non Performing Financing (NPF), Financing to Deposit Ratio (FDR), Inflasi dan Capital Adequancy Ratio (CAR) terhadap Proporsi Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia . Skripsi. Surakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Husnan, Suad. 1998. *Manajemen Keuangan Teori dan Penerapan (Jangka Panjang) Edi keempat*. BPFE. Yogyakarta.
- Indriyo Gitosudarmo dan Basri. 2002. *Manajemen Keuangan*. Yogyakarta: Penerbit BPFE.

- Jaih Mubarak*, 2004. *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam)*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy).
- Juliana, Siscadan Ade SofyanMulazid. 2017. “AnalisaPengaruh BOPO, Kecukupan Modal, Pembiayaan Bermasalah, Bagi Hasil Dan Profitabilitas Terhadap Simpanan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Periode 2011-2015”. *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* Volume 2/No.1/ Juni 2017
- Katmas, Ekarina. 2014. *Pengaruh Faktor Eksternal dan Internal Terhadap Volume Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia*. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum.
- Kurniawanti , A., & Zulfikar. 2014. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Seminar Nasional dan Call For Paper Program Studi FEB UMS*.
- Lestari, F. Suci. 2013. *Peranan kinerja keuangan terhadap besarnya pembiayaan perbankan syariah di Indonesia*. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Meydianawathi, Luh Gede. 2007. Analisis Perilaku Penawaran Kredit PerbankanKepada Sektor UMKM di Indonesia (2002-2006). *Buletin Studi Ekonomi* Vol.12 No.2
- Muhammad. (2009). *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muhammad. 2005. *Manajemen Pembiayaan Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP. YKPN.
- Mulyono, Sri. 2006. *Statistika Untuk Bisnis & Ekonomi Edisi ketiga*. Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi UI. Jakarta.
- Nafilah, Laili. 2017. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pembiayaan Murabahah, Musyarakah Dan Mudharabah Dengan *Non Performing Finance* Sebagai Variabel Intervening. Skripsi. Jurusan Perbankan Syariah (S1) Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Nurjaya, Endang. 2011. Analisis Pengaruh Inflasi, SWBI, NPF, dan DPK terhadap Pembiayaan Murabah Pada Bank Syariah di Indonesia (Periode Januari 2007-Maret 2011). Jakarta : Skripsi UIN Syarif Hidayatullah.
- N.Lapoliwa dan Daniel S. Kuswandi. 2000. *Akuntansi Perbankan* Jakarta: Institut Bankir Indonesia.

- Permatasari, Devi & Ahmad Rudi Yulianto. 2018. Analisis Kinerja Keuangan : Kemampuan Bank Syariah Dalam Penyaluran Pembiayaan. *Jurnal Akuntansi Indonesia, Vol. 7 No. 1 Januari 2018, Hal. 69 - 79*
- Purnomo, Hafidh Wahyu dan Aref Lukman Santoso. (2015). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Barbasis Margin pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Pusat Studi Ekonomi Islam UNS.
- Riyadi, Selamat. 2006. *Banking Assets and Liability Management*. Penerbit Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Rivai, V., S. Basir, S. Sudarto, dan A. P. Veithzal. 2012. *Commercial Bank Management: Manajemen Perbankan dari Teori ke Praktik*. PT. Raja Grafindo Perkasa. Jakarta.
- Sastradipoera, Komaruddin. 2004. *Strategi Menejemen Bisnis Perbankan*. Bandung : Kappa-Sigma.
- Sentausa, Sentot A. 2009. Perbankan Minta BI Mempermudah Aturan. Kompas.com. Rabu 25 Maret 2009
- Sitanggang. 2012. *Manajemen Keuangan Perusahaan*. Jakarta : Penerbit Mitra Wacana Media.
- Sudarsono Heri, 2003. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Ekonisia, Yogyakarta.
- Sutrisno. 2001. *Manajemen Keuangan "Teori, Konsep dan Aplikasi"*. Yogyakarta: Ekonosia
- Suwarsi. 2008. Pengaruh Loan To Asset Ratio, Rate Of Return On Loan Ratio, Capital Adequacy Ratio, Dan Non Performing Financing Terhadap Penyaluran Pembiayaan. *Jurnal Universitas Muhammadiyah Malang*.
- Triasdini, Himaniar. 2010. Pengaruh CAR, NPL Dan ROA Terhadap Penyaluran Kredit Modal Kerja (Studi Pada Bank Umum Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2004-2009). Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
- Wardiantika, Lifstin Dan Rohmawati Kusumaningtias. 2014. Pengaruh DPK, CAR, NPF, DAN SWBI Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012. *Jurnal Ilmu Manajemen | Volume 2 Nomor 4 Oktober 2014* .
- Wardi, Jeni & Gusmarila Eka Putri. 2011. *Analisis Perlakuan Akuntansi Syariah Untuk Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, serta Kesesuaiannya Dengan PSAK No . 102, dan 105*.

- Widiastuty, Tri. 2017. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Manajemen*/Volume Xxi, No. 01, Februari 2017: 90-103
- Weston, J Fred., Thomas E Copeland. 1997. *Manajemen Keuangan*. Alih bahasa oleh Jaka Wasana & Kibranoko. Jakarta : Penerbit Binarupa Aksara.
- Yuda, I Made Pratista & Wahyu Meiranto. 2010. “Pengaruh Faktor Internal Bank terhadap Jumlah Kredit yang Disalurkan (Studi Empiris pada Bank yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)”. *Diponegoro Jurnal Akuntansi dan Auditing*. Volume 7, nomor 1, hlm 94-110.

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

